Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS KESEHATAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Geopark Meratus

INDONESIA EMAS 2045

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan kesehatan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri . Selain itu, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur Kalimantan Selatan. Melalui dokumen ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan, serta memperkuat sistem kesehatan daerah secara menyeluruh.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan strategis yang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan, serta senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin

Banjarmasin, September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan,

dr. H. Diauddin, M.Kes
NIP 197709232006041015

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.2 Permasalahan Perangkat Daerah 69

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1.Tujuan 83

3.2 Sasaran 84

3.3 Strategi Perangkat Daerah..... 86

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah 87

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Uraian Program 91

4.2. Uraian Kegiatan 92

4.3. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 93

4.4. Uraian Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas 160

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 163

4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 164

BAB V P E N U T U P

5.1. Kesimpulan 165

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 166

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk terwujudnya kesehatan bagi semua, dimana setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk pada seluruh siklus hidup di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta terjaminnya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga tercapai tujuan transformasi sosial menciptakan manusia Indonesia unggul. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara program dan sektor, serta kesinambungan yang berpotongan/*crosscutting* secara holistik. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang terukur dan terstruktur serta sesuai tematik program.

Sasaran Pembangunan Kesehatan sesuai RPJP Nasional 2025-2045 dan Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperkuat pelayanan kesehatan dasar, melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberian makanan gratis untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Sidang umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia pada 25 September 2015, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global tahun 2030. TPB/SDGs berisikan 17 goals dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2016-2030. Fokus pada masalah kesejahteraan sosial, Dinas Kesehatan secara konsisten mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human* Development *Index* (HDI), dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua siklus hidup dengan sasaran: mengakhiri kematian ibu, bayi dan balita, mengakhiri stunting, mengakhiri epidemi penyakit menular, mengakhiri kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), meningkatkan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, mencapai cakupan kesehatan universal, meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, obat dan vaksin, penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan serta secara terintegrasi mendukung prioritas urusan/bidang/kinerja Perangkat Daerah lain seperti

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

pengelolaan air bersih dan sanitasi layak, pariwisata berkelanjutan, kota dan permukiman berkelanjutan, indeks kualitas lingkungan hidup dengan komponen indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan prioritas lainnya.

Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menjamin akses layanan yang merata, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan pada setiap tahap kehidupan. Pendekatan ini memastikan keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan, baik dalam pelayanan dasar maupun lanjutan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan optimal.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan.

Untuk meimplementasikan undang-undang tersebut, maka sangatlah penting mengenal struktur organisasi di suatu instansi yang diharapkan dapat mencapai pembangunan daerah berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun melalui proses pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, secara *top down-bottom up* dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan tahapan: (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 memiliki Visi “Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dengan fokus pada Misi 1 Mewujudkan

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Transformasi Sosial yaitu dengan pembangunan sumberdaya manusia yang optimal, yang kemudian dijabarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dengan V**isi :**

"KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) melalui Gerbang Logistik Kalimantan"

dengan menekankan pada **Misi ke-1 (satu) Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia**, **Misi ke-5 (lima) Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat**, serta ikut mendorong misi lain secara *crosscutting* yaitu **Misi ke 2 (dua) Pembangunan Infrastruktur yang handal, Misi ke 3 (tiga) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah,** serta **Misi ke 4 (empat) Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim.**

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pembangunan kesehatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen anggaran serta instrumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan setiap tahun sesuai periode berkenaan.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

12. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghapus UU No.419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 No.419), UU No.4 Tahun 2004 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kesehatan, UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204)
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

39. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0109 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah di Bidang Kesehatan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang disertai dengan anggaran yang bersifat indikatif;
2. Menyediakan pedoman dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi perencanaan penganggaran program kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029;
4. Memberikan pedoman penyusunan Renstra bidang kesehatan di kabupaten/kota secara holistik terintegrasi dan berbasis spasial;
5. Sebagai instrumen penilaian/evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Selatan tahun 2025-2029;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan,

Mengemukakan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, menjelaskan maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah,

Memuat informasi tentang tupoksi dan struktur organisasi, ulasan ringkas sumber daya yang dimiliki, capaian kinerja pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, Identifikasi permasalahan dan perumusan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi serta perumusan Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan,

Memuat informasi rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan berupa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan yang disertai dengan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup

Memuat Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Kalimantan Selatan.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.1 Dinas Kesehatan dan UPTD

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan Kesehatan masyarakat;
3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4) Pelaksanaan kebijakan pelayanan Kesehatan;
5) Pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya Kesehatan;
6) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan, serta dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang membawahi:
    1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
    1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2) Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa; dan
    3) Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahi:
    1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
    3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahi:
    1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    3) Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
f. Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi:
    1) Seksi Kefarmasian;
    2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
    3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. Jabatan Fungsional
h. UPTD
    1) Instalasi Farmasi
    2) Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
    3) Laboratorium Kesehatan
    4) Balai Pelatihan Kesehatan
    5) Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

1) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab terhadap obat dan perbekalan kesehatan, krisis kesehatan, kebugaran masyarakat, laboratorium dan pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. Struktur organisasi UPT terdiri dari Kepala dan KTU. UPT Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. **UPTD Instalasi Farmasi**

Untuk melaksanakan tugas, Instalasi Farmasi mempunyai tugas:

1) Penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan Instalasi Farmasi;
2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan, dan pelaporan persediaan dan mutasi obat dan perbekalan kesehatan;
3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan Kesehatan;
4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pengamatan terhadap mutu/kualitas obat dan perbekalan Kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
5) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
6) Pembinaan, pengaturan, dan pengelolaan ketatausahaan.

b. UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)

Untuk melaksanakan tugas, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program pelayanan kesehatan olahraga masyarakat;
2) Pelayanan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi masyarakat;
3) Fasilitasi penentuan takaran latihan olahraga sesuai dengan cabang olahraga;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4) Fasilitasi penentuan takaran latihan olahraga untuk pemulihan pada penderita penyakit tertentu;
5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani;
6) Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan tentang kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani;
7) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

c. UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas, Laboratorium Kesehatan (Labkes) mempunyai fungsi:
2) Penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pelayanan jasa laboratorium kesehatan;
3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi kesehatan;
4) Penyusunan program,koordinasi pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia dan patologi kesehatan;
5) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kemitraan dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan jasa laboratorium kesehatan;
6) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengendalian mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan; dan
7) Pembinaan Pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

d. **UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)**

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
6) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pengendalian mutu dan akreditasi Balai Pelatihan Kesehatan;
7) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kemitraan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
8) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
9) Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

e. **UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan**

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis dan epidemi kesehatan.

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan krisis dan epidemi kesehatan;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan krisis dan epidemi kesehatan;
3) Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan krisis dan epidemi kesehatan;
4) Penyusunan kegiatan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pencegahan krisis kesehatan dan kejadian luar biasa (KLB)/Epidemi Kesehatan;
5) penyusunan kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan dan kejadian luar biasa (KLB} /Epidemi Kesehatan;
6) penyusunan kegiatan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana;
7) penyusunan kegiatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/Epidemi Kesehatan;
8) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
9) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Unit Pelayanan Krisi dan Epidemi Kesehatan;
10) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dan penyusunan standar operasional prosedur pada UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan.

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

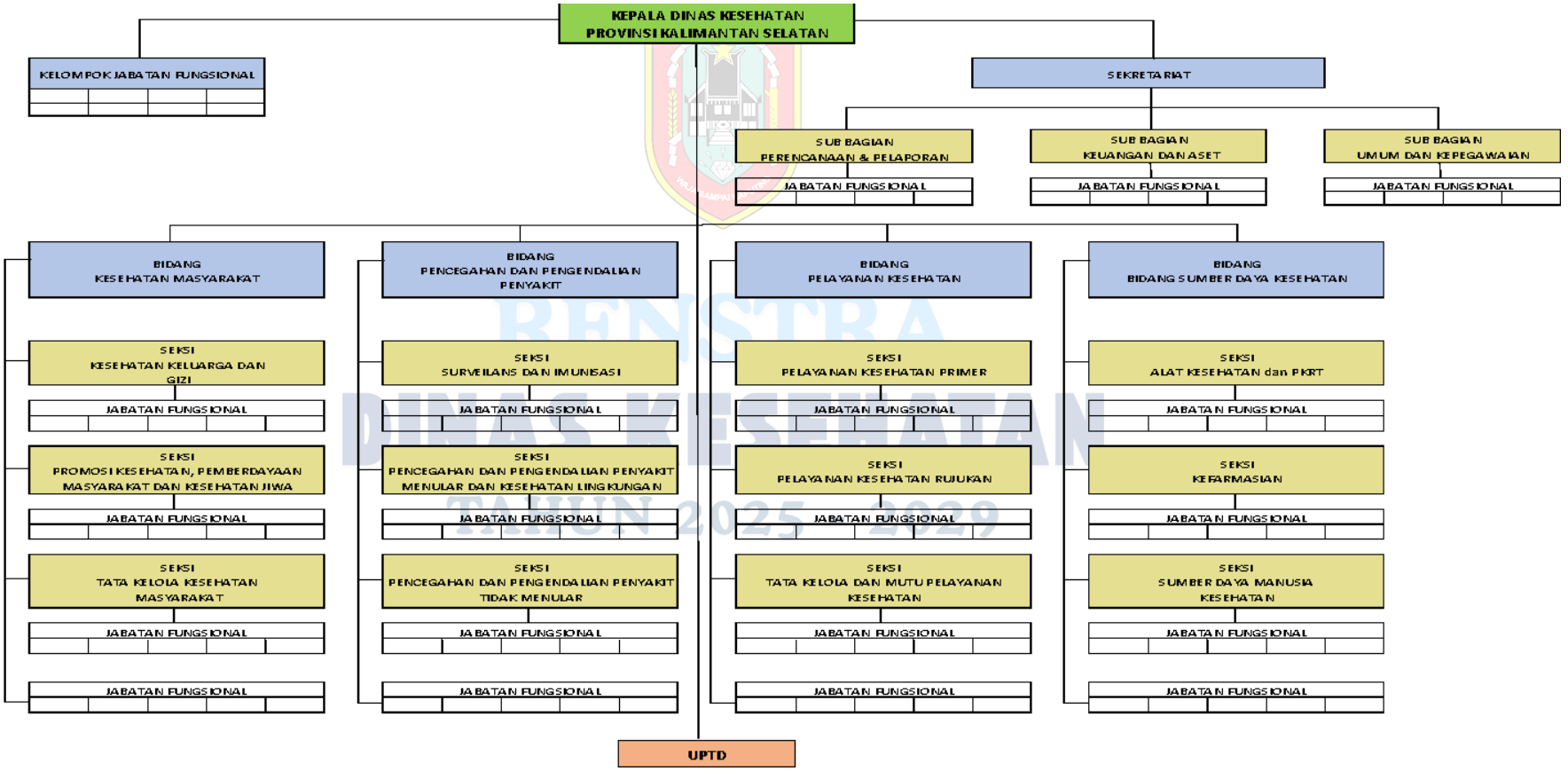

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

2.1.1.2 Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) adalah **PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini, khususnya Pasal 21 ayat 1**, mengatur bahwa Rumah Sakit Daerah (RSD) dapat menjadi UOBK, memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.

a. RSUD Ulin

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, khususnya pelayanan Kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. RSUD Ulin dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
2) Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan;
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan; dan
5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, fasilitasi hukum dan perencanaan Rumah Sakit;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Ulin mempunyai Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

1) Direktur;
2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
3) Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
4) Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat;
5) Bagian Umum terdiri atas:
   - Sub Bagian Tata Usaha;
   - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
   - Sub Bagian Prasarana.
6) Bagian Keuangan terdiri atas:
   - Sub Bagian Perbendaharaan;
   - Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran; dan
   - Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan.
7) Bagian Akuntansi terdiri atas:
   - Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan;
   - Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Barang; dan
   - Sub Bagian Analisa Pendapatan, Belanja dan Pengendalian.
8) Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:
   - Sub Bagian Perencanaan;
   - Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Data; dan
   - Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
9) Bidang Pelayanan Medik terdiri atas:
   - Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
   - Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
10) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri atas:
   - Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
   - Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

11) Bidang Penunjang terdiri atas:
    - Seksi Sarana Medik; dan
    - Seksi Sarana Non Medik.
12) Bidang Kepegawaian terdiri atas:
    - Seksi Pengelolaan Data dan Perencanaan Pegawai; dan
    - Seksi Administrasi Kepegawaian.
13) Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu terdiri atas:
    - Seksi Diklat dan Litbang; dan
    - Seksi Mutu dan Akreditasi.
14) Bidang Hukum dan Humas terdiri atas:
    - Seksi Hukum dan Kemitraan; dan
    - Seksi Humas dan Informasi.
15) Komite;
16) Satuan Pemeriksaan Internal;
17) Instalasi/Unit; dan
18) Kelompok Jabatan fungsional.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Ulin Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Rumah Sakit Ulin Banjarmasin

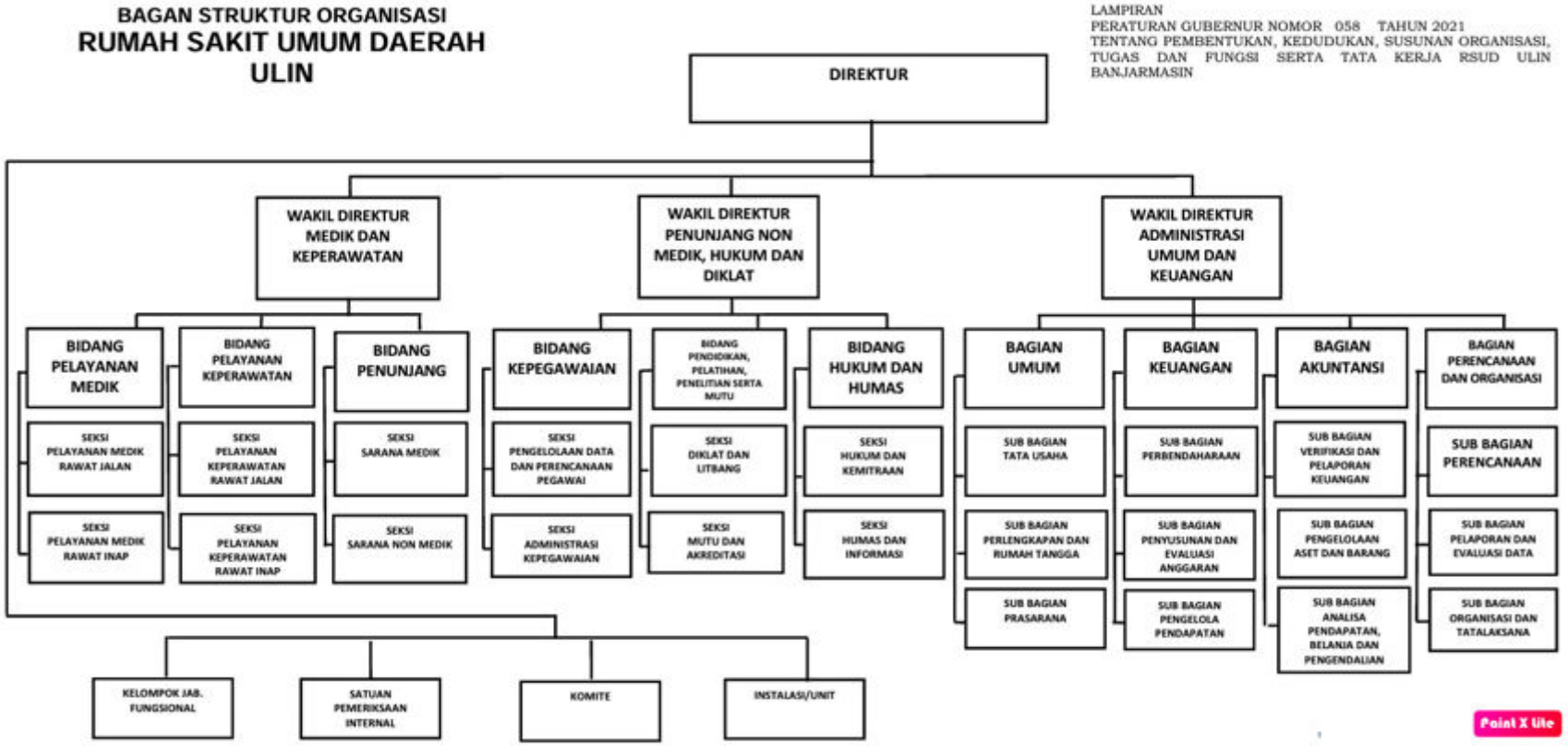

b. RSUD dr. H. Moch. Anshari Saleh

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Tugas Pokok RSUD dr. H.Moch. Ansari Saleh adalah Kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. yang telah diatur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku , dengan uraian sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan medik;
3) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
4) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
5) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan rujukan;
6) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
7) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8) Memantau dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
10) Memantau integritas seluruh penyelenggara kegiatan di rumah sakit sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, rumah sakit mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1) Direktur;
2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
3) Wakil Direktur Pelayanan
4) Wakil Direktur Penunjang Medik
5) Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas
   - Sub Bagian Hukum, Humas, dan Kemitraan;
   - Sub Bagian Kepegawaian;
   - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
6) Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri dari atas
   - Sub Bagian Perencanaan;
   - Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
   - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
7) Bagian Keuangan dan Akuntansi terdiri atas
   - Sub Bagian Pengelolaan Dana
   - Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
   - Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi
8) Bagian Pelayanan Medik terdiri atas
   - Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Medik
   - Seksi Sarana Medik
9) Bidang Keperawatan terdiri atas
   - Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Keperawatan;
   - Seksi Sarana Keperawatan
10) Bidang Penunjang Medik terdiri atas
   - Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Penunjang Medik;
   - Seksi Sarana Penunjang Medik

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

11) Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Rekam Medik terdiri atas

- Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- Seksi Penelitian dan Pengembangan serta Rekam Medik

12) Komite

13) Satuan Pemeriksaan Internal

14) Instalasi/unit

15) Kelompok Jabatan Fungsional

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Gambar 2.3

Struktur Organisasi RSUD Anshari Saleh

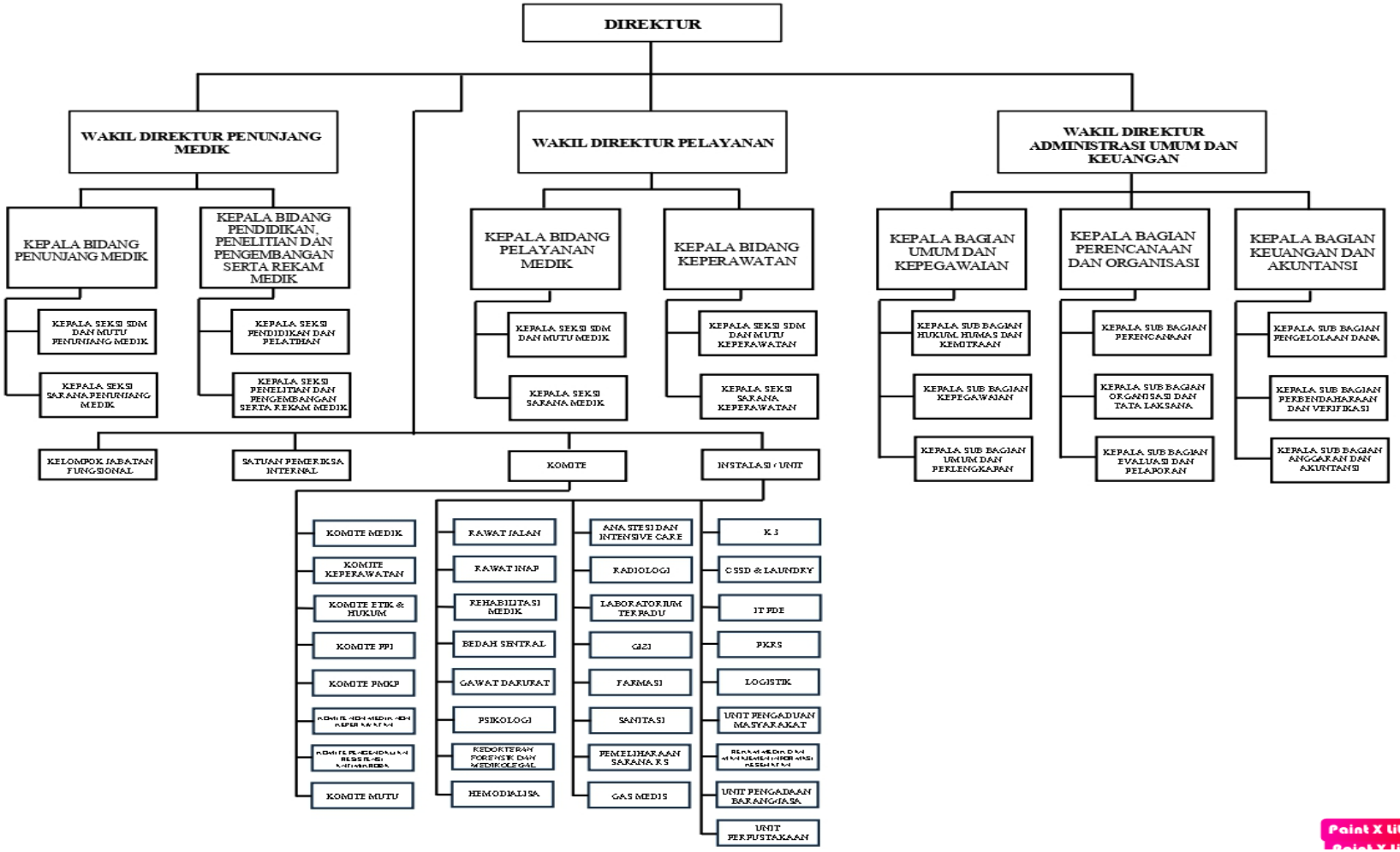

Paint X Lite

c. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai tugas melaksanakan upaya Kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya peningkatan Kesehatan lainnya serta pencegahan penyakit kejiwaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan Kesehatan jiwa dan Kesehatan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan medik;
3) Menetapkan kebijakan operasional penunjang medik;
4) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan penyalahgunaan napza/narkoba;
5) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
6) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan Kesehatan jiwa rujukan;
7) Menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan;
8) Memantau dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
9) Memantau dan mengendalikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
10) Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

11) Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan Kesehatan jiwa dan Kesehatan lainnya;
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu

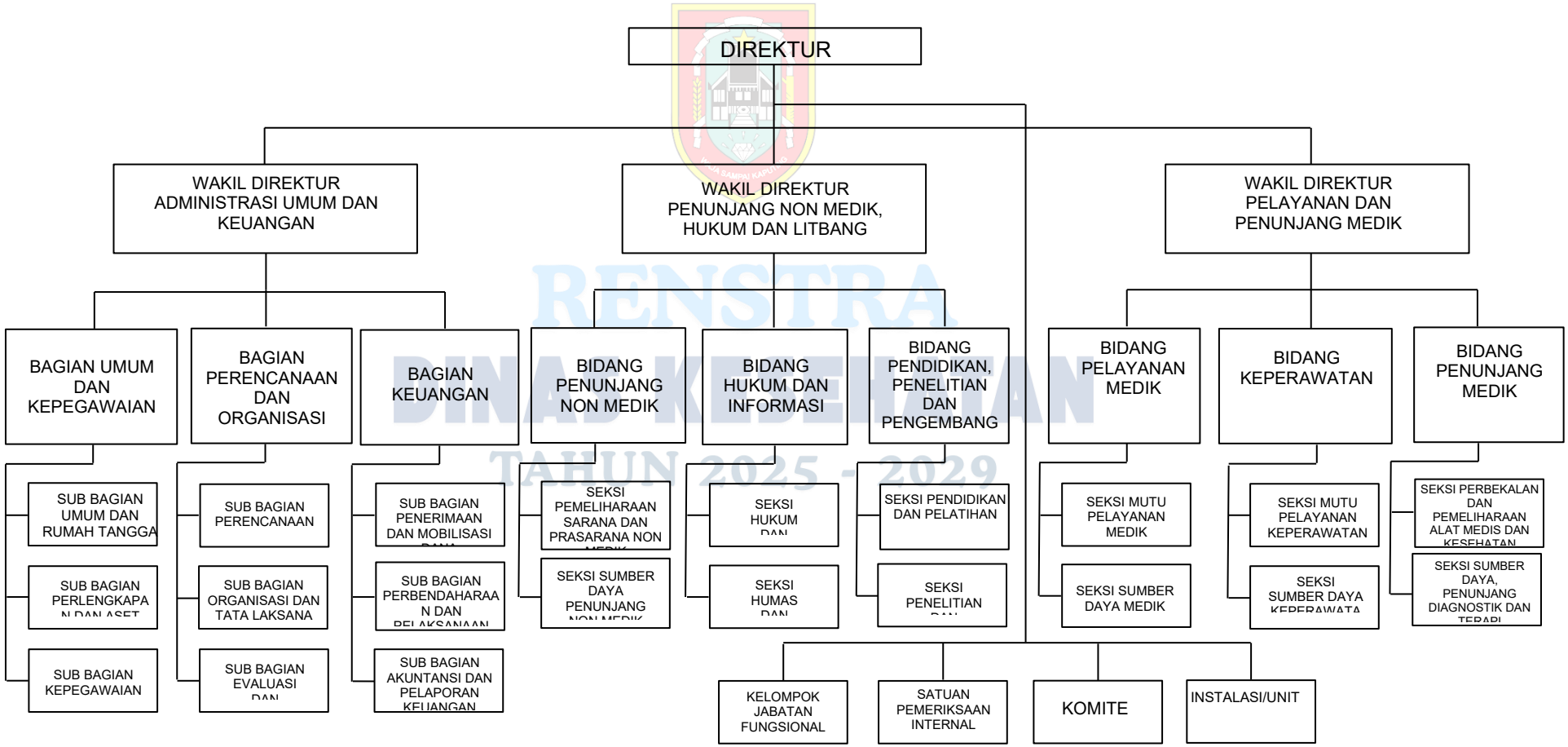

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

d. RSGM Gusti Hasan Aman

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman mempunyai tugas sebagai sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyelenggaraan pelayanan medis gigi dasar, medis dasar dan spesialistik sesuai standar pelayanan rumah sakit;
2) Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan;
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan; dan
5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, fasilitasi hukum dan perencanaan Rumah Sakit;
6) Pelayanan medis gigi dasar dan spesialistik;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

7) Penunjang medis dan asuhan keperawatan gigi;
8) Pelayanan kesehatan gigi rujukan;
9) Pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan;
10) Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
11) Penyusunan program, rekam medis dan informasi;
12) Pengelolaan urusan kesehatan gigi dan mulut;
13) Merumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14) Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
15) Sebagai tempat praktek calon dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unlam Kalimantan Selatan;
16) Sebagai tempat Rumah Sakit rujukan kesehatan gigi dan mulut di Kalimantan Selatan dan;
17) Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Unsur-unsur organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1) Direktur;
2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
   - Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian; dan
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3) Bidang Pelayanan terdiri atas:
   - Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
   - Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik.
4) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta Pengembangan terdiri atas:
   - Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
   - Seksi Penelitian dan Pengembangan.
5) Satuan Pemeriksaan Internal;
6) Instalasi/Unit; dan

7) Kelompok Jabatan fungsional.
8) Satuan Pemeriksa Internal
9) Komite Medik
10) Kelompok Staf Medik Fungsional dan
11) Instalasi

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Gambar 2.5

Struktur Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman

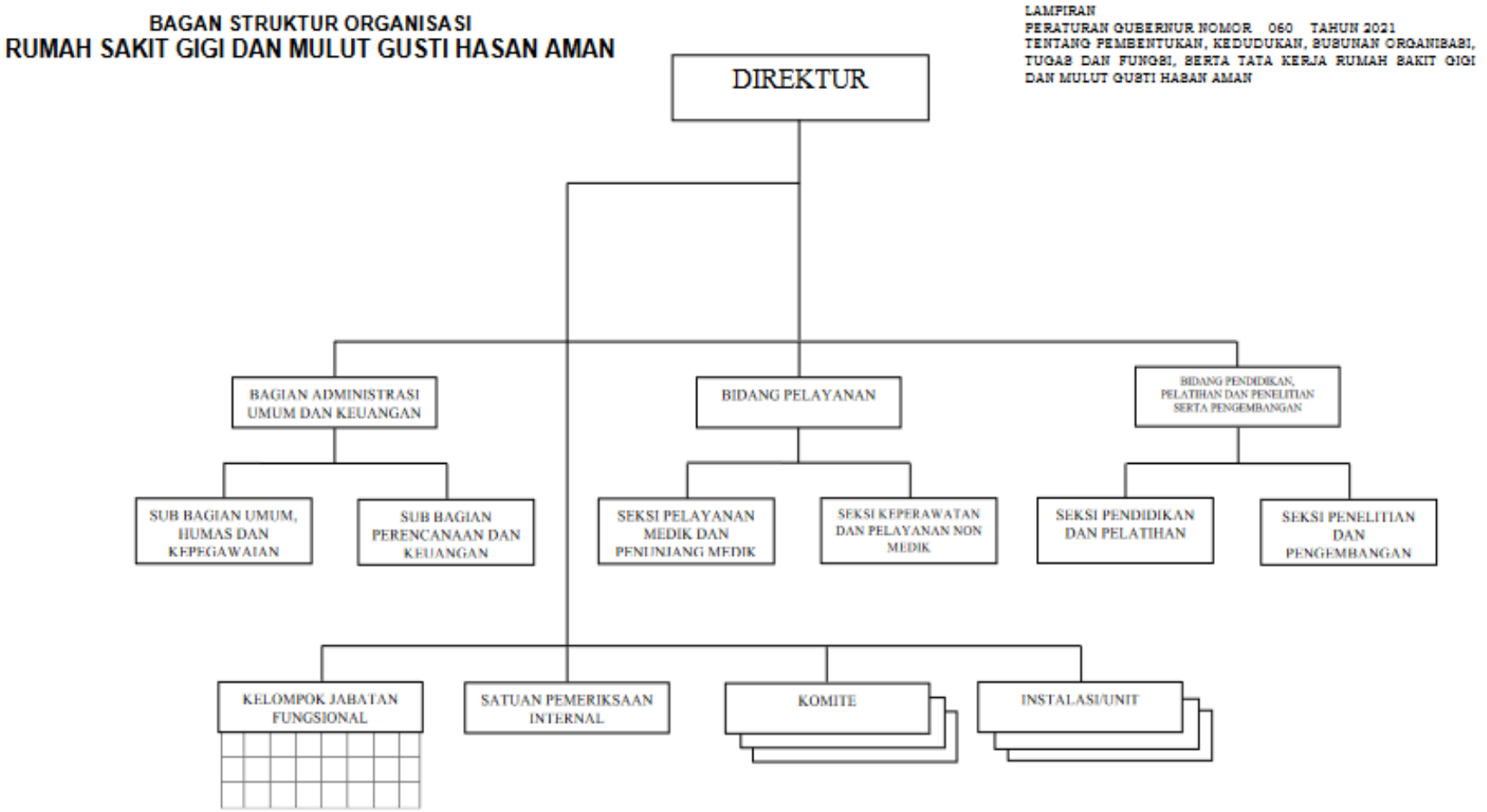

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 125 orang untuk ASN dan Non ASN sebanyak 72 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	1	0	1
3	SLTA	4	5	9
4	D-I	0	0	0
5	D-II	0	0	0
6	D-III/Akademi	7	7	14
7	D-IV	0	10	10
8	S-1	14	42	56
9	S-2/Spesialis	15	18	33
10	S-3	1	1	2
Jumlah		**42**	**83**	**125**

2. Menurut Jenis Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**JABATAN PIMPINAN TINGGI**			
	a. UTAMA	-	-	-
	b. MADYA	-	-	-
	c. PRATAMA	1	-	1
2	**ADMINISTRATOR**	3	1	4
	PENGAWAS	7	8	15
	PELAKSANA	14	37	51
3	**FUNGSIONAL TERTENTU**			
	a. Analis Kebijakan	0	1	1
	b. Administrator Kesehatan	5	15	20
	c. Analis SDM Aparatur	0	2	2

RENSTRA DINAS KESEHATAN

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	d. Arsiparis	0	1	1
	e. Epidemiolog Kesehatan	3	6	9
	f. Pranata Komputer	7	1	8
	g. Tenaga Promkes & Ilmu Perilaku	2	4	6
	h. Perencana	1	1	2
	i. Nutrisionis	0	3	3
	j. Sanitarian	0	1	1
	k. Pembimbing Kes. Kerja	0	2	2
Jumlah		**42**	**83**	**125**

3. Menurut Tingkat Jabatan

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**Golongan I**			
	I/a			
	I/b			
	I/c			
	I/d	0	0	0
2	**Golongan II**			
	II/a	0	0	0
	II/b	0	0	0
	II/c	5	1	6
	II/d	0	2	2
3	**Golongan III**			
	III/a	6	26	32
	III/b	8	8	16
	III/c	7	12	19
	III/d	5	22	27
4	**Golongan IV**			
	IV/a	7	11	18
	IV/b	4	1	5
	IV/c	0	0	0
	IV/d	0	0	0
Jumlah		**42**	**83**	**125**

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4. Tenaga Non ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	2		2
2	SLTP			0
3	SLTA	19	10	29
4	D-I			0
5	D-II			0
6	D-III/Akademi	2	3	5
7	D-IV		2	2
8	S-1	13	19	32
9	S-2/Spesialis	1	1	2
10	S-3			0
Jumlah		**37**	**35**	**72**

RSUD ULIN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Ulin sampai dengan tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 1546 orang untuk ASN dan Non ASN sebanyak 499 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	2	2	4
2	SLTP	5	0	5
3	SLTA	30	37	67
4	D-I	1	3	4
5	D-II	0	0	0
6	D-III/Akademi	269	517	786
7	D-IV	19	41	60
8	S-1	174	278	452
9	S-2/Spesialis	76	81	157
10	S-3	9	2	11
Jumlah		**585**	**961**	**1546**

2. Menurut Jenis Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**JABATAN PIMPINAN TINGGI**			
	a. UTAMA			
	b. MADYA			
	c. PRATAMA	2	0	2
2	**ADMINISTRATOR**	7	3	10
	PENGAWAS	15	5	20
	PELAKSANA	51	74	125
3	**FUNGSIONAL TERTENTU**			
	Dokter Sub Spesialis	22	9	31
	Dokter Spesialis	31	34	65
	Dokter Umum	7	28	35
	Dokter Gigi Spesialis	1	5	6
	Dokter Gigi	1	1	2
	Perawat	348	478	826
	Bidan	0	120	120
	Perawat Gigi	0	2	2
	Terapis Gigi dan Mulut	0	5	5
	Apoteker	7	17	24
	Asisten Apoteker	9	42	51
	Administrator Kesehatan	8	15	23
	Pranata Lab.Kes	11	39	50
	Epidemiolog Kesehatan	1	0	1
	Sanitarian	6	6	12
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	1	2
	Nutrisionis	5	31	36
	Radiografer	15	12	27
	Fisikawan Medis	1	0	1
	Perekam Medis	9	8	17
	Teknisi Elektromedis	6	2	8
	Fisioterapis	5	7	12
	Refraksionis Optisien	1	3	4
	Terapi Wicara	1	1	2
	Okupasi Terapis	1	1	2
	Ortotis Prostetis	1	1	2
	Psikologi Klinis	0	4	4
	Pembimbing Kesehatan Kerja	0	2	2

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	2
	Pranata Komputer	4	1	5
	Asisten Penata Anestesi	5	0	5
	Penata Anestesi	1	0	1
	Pustakawan	0	0	0
	Arsiparis	0	1	1
	Teknisi Gigi	1	1	2
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	0	1	1
	Teknisi Transfusi Darah	0	0	0
	Jumlah	**585**	**961**	**1546**

3. Menurut Tingkat Jabatan

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**Golongan I**			
	I/a	0	0	0
	I/b	0	0	0
	I/c	1	0	1
	I/d	2	1	3
2	**Golongan II**			
	II/a	2	1	3
	II/b	4	1	5
	II/c	179	255	434
	II/d	36	50	86
3	**Golongan III**			
	III/a	31	47	78
	III/b	120	238	358
	III/c	29	65	94
	III/d	79	208	287
4	**Golongan IV**			
	IV/a	41	24	65
	IV/b	26	27	53
	IV/c	27	39	66
	IV/d	2	2	4
	IV/e	6	3	9
Jumlah		**585**	**961**	**1546**

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4. Tenaga Non ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	SD	4	1	5
	SLTP	22	8	30
	SLTA	104	88	192
	D-I	7	19	26
	D-II	4	1	5
	D-III/Akademi	44	31	75
	D-IV	0	3	3
	S-1	50	91	141
	S-2/Spesialis	9	12	21
	S-3	1	0	1
Jumlah		**245**	**254**	**499**

RSUD dr. H. MOCH. ANSHARI SALEH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Anshari Saleh sampai dengan tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 1546 orang untuk ASN dan Non ASN sebanyak 499 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	1	3	4
2	SLTP	5	9	14
3	SLTA	63	108	171
4	D-I	0	0	0
5	D-II	0	0	0
6	D-III/Akademi	150	302	452
7	D-IV	16	31	47
8	S-1	136	236	372
9	S-2/Spesialis	42	51	93
10	S-3	1	1	2
Jumlah		**414**	**741**	**1155**

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

2. Menurut Jenis Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**JABATAN PIMPINAN TINGGI**			
	a. UTAMA			
	b. MADYA			
	c. PRATAMA	1	0	1
2	**ADMINISTRATOR**	6	4	10
	PENGAWAS	11	6	17
	PELAKSANA	28	13	41
3	**FUNGSIONAL TERTENTU**			
	PERAWAT NERS	38	79	117
	PERAWAT D-III	44	58	102
	PERAWAT D-IV	3	1	4
	PERAWAT GIGI	1	2	3
	DOKTER UMUM	2	7	9
	DOKTER SPESIALIS	17	27	44
	DOKTER SPESIALIS KONSULTAN		1	1
	DOKTER GIGI UMUM	1	1	2
	DOKTER GIGI SPESIALIS		1	1
	BIDAN D-III		35	35
	BIDAN D-IV		15	15
	BIDAN S-1		2	2
	PENATA ANESTESI	2	2	4
	ASISTEN PENATA ANESTESI	3	1	4
	NUTRISIONIS	2	24	26
	APOTEKER	1	7	8
	ASISTEN APOTEKER	4	21	25
	PRANATA LABKES	4	19	23
	RADIOGRAFER	8	3	11
	TEKNISI ELEKTROMEDIS	4	3	7
	FISIOTERAPI	1	4	5
	SANITARIAN	1	4	5
	REFRAKSIONIS OPTISIEN		3	3
	OKUPASI TERAPIS		2	2

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	PEREKAM MEDIS		2	2
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	2
	PSIKOLOG KLINIS		2	2
	ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	1
	TERAPIS WICARA		1	1
	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA		1	1
	PRANATA KOMPUTER	4		4
	PNS TUGAS BELAJAR	3	1	4
Jumlah		**190**	**354**	**544**

3. Menurut Tingkat Jabatan

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	**Golongan I**			
	I/a			
	I/b			
	I/c			
	I/d	1	0	1
2	**Golongan II**			
	II/a	1	0	1
	II/b	2	0	2
	II/c	16	23	39
	II/d	18	25	43
3	**Golongan III**			
	III/a	20	19	39
	III/b	28	64	92
	III/c	15	75	90
	III/d	45	87	132
4	**Golongan IV**			
	IV/a	25	34	59
	IV/b	10	13	23
	IV/c	7	9	16
	IV/d	1	0	1
	IV/e	5	2	7
5	PPPK			
	VII	76	120	196

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	IX	6	18	24
	X	36	62	98
Jumlah		**312**	**551**	**863**

4. Tenaga Non ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	SD	1	3	4
	SLTP	5	5	10
	SLTA	94	59	153
	D-I	0	0	0
	D-II	0	0	0
	D-III/Akademi	11	24	35
	D-IV	1	0	1
	S-1	34	49	83
	S-2/Spesialis	5	1	6
	S-3	0	0	0
Jumlah		**151**	**141**	**292**

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

RS JIWA SAMBANG LIHUM

Karyawan Rumah Sakit Jiwa per 30 April 2024 Memiliki 444 Pegawai ASN dan 144 Tenaga Non ASN yang meliputi :

1) DATA PEGAWAI BERDASARAN PENDIDIKAN FORMAL

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	D-I		1	1
2	D-III	88	80	168
3	D-IV	3	9	12
4	S-1	71	98	169
5	S-2	37	32	69
6	S-3	1	1	2
7	SD	1		1
8	SMA/SMK	8	9	17
9	SMP	5		5
Jumlah		214	230	444

2) DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS JABATAN

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	I/d	2		2
2	II/a	4		4
3	II/b	1		1
4	II/c	49	50	99
5	II/d	7	10	17
6	III/a	10	24	34
7	III/b	79	73	152
8	III/c	19	22	41
9	III/d	27	30	57
10	IV/a	12	14	26
11	IV/b	3	7	10
12	IV/c	1		1
Jumlah		214	230	444

3) DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT JABATAN

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA		1	1
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	2	3
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		3	3
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1	1
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	7	2	9
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	1	3
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1		1
8	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1		1
9	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS		2	2
10	AHLI PERTAMA - PERAWAT	34	33	67
11	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		3	3
12	AHLI PERTAMA - SANITARIAN		1	1
13	APOTEKER AHLI MADYA	1	2	3
14	APOTEKER AHLI PERTAMA		1	1
15	ASISTEN APOTEKER MAHIR	1		1
16	ASISTEN APOTEKER PENYELIA		2	2

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
17	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	1	2
18	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	1		1
19	DOKTER AHLI MADYA	2	4	6
20	DOKTER AHLI MUDA	6	6	12
21	DOKTER AHLI PERTAMA	1	2	3
22	DOKTER GIGI PERTAMA		1	1
23	FISIOTERAPIS AHLI MADYA		1	1
24	FISIOTERAPIS AHLI MUDA		1	1
25	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA		1	1
26	FISIOTERAPIS PENYELIA		1	1
27	FISIOTERAPIS TERAMPIL		1	1
28	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1		1
29	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI	1		1
30	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	1
31	KEPALA BIDANG HUKUM DAN INFORMASI	1		1
32	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	1		1
33	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1	1
34	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK	1		1
35	KEPALA BIDANG PENUNJANG NON MEDIK		1	1
36	KEPALA SEKSI HUKUM DAN KERJASAMA		1	1
37	KEPALA SEKSI HUMAS DAN INFORMASI	1		1
38	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	1		1
39	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN MEDIK	1		1
40	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA NON MEDIK	1		1
41	KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1		1
42	KEPALA SEKSI PERBEKALAN DAN PEMELIHARAAN ALAT MEDIS DAN KESEHATAN	1		1

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
43	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KEPERAWATAN		1	1
44	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MEDIK	1		1
45	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PENUNJANG NON MEDIK	1		1
46	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA, PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI		1	1
47	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	1		1
48	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	1		1
49	KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		1	1
50	KEPALA SUB BAGIAN PENERIMAAN DAN MOBILISASI DANA	1		1
51	KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1		1
52	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1		1
53	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET	1		1
54	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA	1		1
55	NUTRISIONIS AHLI MADYA		2	2
56	NUTRISIONIS AHLI MUDA		1	1
57	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA		2	2
58	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR		1	1
59	NUTRISIONIS PENYELIA		1	1
60	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (KELAS 1)	1		1
61	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (KELAS 3)	6		6
62	PEKERJA SOSIAL MAHIR		1	1
63	PEKERJA SOSIAL PENYELIA	1		1
64	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	3	3	6

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
65	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (KELAS 7)	1	1	2
66	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4	8
67	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (KELAS 5)	6	9	15
68	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	2
69	PERAWAT AHLI MADYA	4	5	9
70	PERAWAT AHLI MUDA	7	22	29
71	PERAWAT AHLI PERTAMA	6	14	20
72	PERAWAT GIGI PENYELIA		2	2
73	PERAWAT MAHIR	4	1	5
74	PERAWAT PELAKSANA / TERAMPIL	4	1	5
75	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR	19	7	26
76	PERAWAT PENYELIA	14	5	19
77	PERAWAT TERAMPIL	11	13	24
78	PEREKAM MEDIS PELAKSANA / TERAMPIL		1	1
79	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR	2		2
80	PEREKAM MEDIS PENYELIA		1	1
81	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		1	1
82	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		1	1
83	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1		1
84	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	1		1
85	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR	2		2
86	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	1	1	2
87	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	2
88	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	1	1	2
89	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA		2	2
90	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR		1	1
91	RADIOGRAFER TERAMPIL	1		1
92	SANITARIAN AHLI MUDA		1	1

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	TINGKAT JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
93	SANITARIAN MAHIR	1		1
94	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR	1		1
95	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1		1
96	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		1	1
97	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		1
98	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	2	4
99	TERAMPIL - NUTRISIONIS		2	2
100	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS		1	1
101	TERAMPIL - PERAWAT	22	23	45
102	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	3	2	5
103	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	3	4
104	TERAMPIL - SANITARIAN		1	1
105	TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR		1	1
106	TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA LANJUTAN / TERAMPIL		1	1
107	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA		1	1
108	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		1	1
109	TERAPIS WICARA TERAMPIL		1	1
110	TUGAS BELAJAR		2	2
111	WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	1		1
112	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK		1	1
Jumlah		214	230	444

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4) TENAGA NON ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SLTA	40	22	62
2	D-III	14	6	20
3	S-1	31	29	60
4	S-2		2	2
Jumlah		85	59	144

2.1.2.1 Sumber Daya Aset

Sampai dengan tahun 2024, aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebagai berikut :

NO	NAMA ASET	JUMLAH/LUAS	KONDISI	
			BAIK	BURUK
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	481 m²	✓	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.037 m²	✓	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.800 m²	✓	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000 m²	✓	
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	40.013 m²	✓	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	820 m²	✓	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	560 m²	✓	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	360 m²	✓	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.044 m²	✓	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	872 m²	✓	
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	100 m²	✓	
12	Gedung Pos Jaga Permanen	80 m²	✓	
13	Rumah Negara Golongan I	70 m²	✓	
14	Rumah Negara Golongan I	70 m²	✓	
15	Portable Generating Set	1	✓	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA ASET	JUMLAH/LUAS	KONDISI	
			BAIK	BURUK
16	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	✓	
17	Micro bus (Hiace)	2	✓	
18	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	18	✓	
19	Portable Generating Set	1	✓	
20	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	✓	
21	Micro bus (Hiace)	2	✓	
22	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	18	✓	
23	Pick Up	3	✓	
24	Sepeda Motor	12	✓	
25	Mobil Ambulance	4	✓	
26	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	7	✓	
27	Lemari Besi/Metal	19	✓	
28	Lemari Kayu	11	✓	
29	Rak Besi	2	✓	
30	Rak Kayu	16	✓	
31	Filling Cabinet Besi	13	✓	
32	Brandkas	2	✓	
33	Buffet	1	✓	
34	Tempat Menyimpan Gambar	10	✓	
35	Lemari Kaca	34	✓	
36	Papan Visual/Papan Nama	1	✓	
37	Alat Penghancur Kertas	3	✓	
38	Mesin Absensi	3	✓	
39	Lain2 Alat Kantor Lainnya (Wireless TOA)	1	✓	
40	Meja Kerja Kayu	51	✓	
41	Kursi Besi/Metal	24	✓	
42	Meja Rapat	8	✓	
43	Meja Panjang	10	✓	
44	Meja Makan Besi	1	✓	
45	Kursi Rapat	124	✓	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA ASET	JUMLAH/LUAS	KONDISI	
			BAIK	BURUK
46	Kursi Tamu	1	✓	
47	Meja Komputer	3	✓	
48	Sofa	12	✓	
49	Meubelair Lain-lain	9	✓	
50	Jam Elektronik	10	✓	
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	✓	
52	Mesin Pel/Poles	2	✓	
53	Lemari Es	6	✓	
54	A.C. Split	89	✓	
55	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5	✓	
56	Treng Air/Tandon Air	1	✓	
57	Televisi	13	✓	
58	Sound System	1	✓	
59	Unit Power Supply	4	✓	
60	Tustel	1	✓	
61	Alat Hiasan	7	✓	
62	Dispenser	8	✓	
63	Karpet	10	✓	
64	Gordyn	33	✓	
65	Alat Rumahtangga Lainnya	24	✓	
66	Pompa Air	4	✓	
67	Lain2 Alat Rumah Tangga Lainnya (Pilar Kisi2)	24	✓	
68	Hiasan Dinding (Bunga Plastik)	1	✓	
69	Hiasan Dinding	5	✓	
70	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1	✓	
71	Meja Kerja Pejabat Esselon III	9	✓	
72	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	✓	
73	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	7	✓	
74	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	7	✓	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA ASET	JUMLAH/LUAS	KONDISI	
			BAIK	BURUK
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	129	✓	
76	Kursi Kerja	51	✓	
77	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	30	✓	
78	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	✓	
79	Audio Visual	1	✓	
80	Microphone/Wireless MIC	5	✓	
81	Professional Sound System	1	✓	
82	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	4	✓	
83	Proyektor+Attachment	6	✓	
84	Headphone	2	✓	
85	Camera Digital	1	✓	
86	Camera Attachment	3	✓	
87	Camera Electronic	4	✓	
88	Video Switcher	1	✓	
89	Video Patch Panel	1	✓	
90	Tripod Camera	1	✓	
91	Lensa Kamera	1	✓	
92	Video Conference	3	✓	
93	Drone (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	✓	
94	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	17	✓	
95	Alat Pengolah Data Studio	5	✓	
96	Intermediate Telephone/Key Telephone	2	✓	
97	Handy talky (HT)	26	✓	
98	Telex	2	✓	
99	Sound System	6	✓	
100	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	289	✓	
101	Dental Chair	1	✓	
102	Minor Surgeri Set	1	✓	
103	Alat Kedokteran Poliklinik Lain-lain	1	✓	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA ASET	JUMLAH/LUAS	KONDISI	
			BAIK	BURUK
104	Alat Kesehatan Rehabilitasi	1	✓	
105	Diagnostic X Ray	1	✓	
106	Peralatan Fitnes	1	✓	
107	P.C Unit	107	✓	
108	Lap Top	41	✓	
109	Note Book	63	✓	
110	Lain-lain Peralatan Komputer Mainframe	5	✓	
111	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	2	✓	
112	Printer	67	✓	
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	✓	
114	Peralatan Mini Komputer Lain-Lain	5	✓	
115	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	18	✓	
116	External/ Portable Hardisk	5	✓	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Kalimantan Selatan secara berkesinambungan melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pengendalian Penyakit dan bidang Sumber Daya Kesehatan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat serta sumber daya kesehatan, dilakukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan Kementerian Kesehatan RI serta Lintas Program dan Lintas Sektor terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sinergisme dilakukan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi. Namun demikian, koordinasi dan sinergisme antar lembaga/OPD ini masih perlu ditingkatkan guna

mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Upaya advokasi yang lebih intens dan proaktif oleh Perangkat Daerah yang bergerak di sektor kesehatan dalam rangka mendorong lintas sektor terkait berkontribusi aktif melaksanakan program- program pembangunan berwawasan kesehatan.

Dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat diukur dari capaian Indikator Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan, yang meliputi indikator tujuan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan indikator sasaran dari pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting dan Angka Kesakitan. Capaian tersebut dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Selatan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka	68,66	68,83	70,64	71,05	71,46	73,28	73,43	73,7	73,97	74,18	106,7	106,7	104,3	104,1	103,8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	135	205	112	111	110	135	205	136	145	146	100	100	77,68	69,37	67,27
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	9	9	9	8	7	8,7	9	10	11,7	11,2	100	100	88,89	53,75	40
	Prevalensi Stunting	%	31	30	29	26	16	12,2 (E-PPGBM)	30	24,6	24,7	22,9	254	100	117,9	105,3	69,9
	Angka Kesakitan	%	N/A	15,3	13	12,5	12	N/A	13,6	11,6	6,7	5,4	N/A	112,5	110,77	146,16	154,96
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Layanan Bidang Kesehatan)	poin	N/A	N/A	82,5	83	83,5	N/A	N/A	83,2	83,48	89,3	N/A	N/A	100,85	100,58	106,95
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dicanangkan	inovasi	N/A	N/A	1	2	3	N/A	N/A	1	2	3	N/A	N/A	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, pelayanan dasar kesehatan pada tingkat provinsi mencakup dua hal utama yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau yang berada pada wilayah dengan potensi bencana di tingkat provinsi; dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) di wilayah provinsi. Kedua jenis pelayanan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah provinsi dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan berisiko tinggi. Berikut tabel capaian kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal urusan sosial dari tahun 2020 - 2024 :

Tabel 2.2

Capaian kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau yang berada pada wilayah dengan potensi bencana di tingkat provinsi;	100	100	100	100	100	100
2	Penduduk pada kondisi KLB provinsi	Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) di wilayah provinsi	100	100	100	100	100	100

DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.3

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2020 - 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,87	1,4	1,6	1,6	1,49
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	persen	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	persen	100	100	100	100	100

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.013.665.150	78.861.758.504	84.260.805.315	62.957.903.374	62.973.700.284	47.865.307.873	95,37	79,85	56,81
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.895.255.486	67.456.735.106	77.683.095.864	42.295.991.205	68.986.264.496	40.858.551.582	75,67	102,27	52,60
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.928.553.148	36.688.505.965	46.052.998.273	24.769.476.999	22.981.424.679	10.803.635.090	74,61	54,48	18,74
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	N/A	3.430.708.000	4.008.564.200	N/A	251.412.680	163.114.050	N/A	7,33	4,07
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.471.400.500	2.776.306.660	3.192.752.659	1.587.515.334	1.198.888.206	1.783.502.326	108	43,18	55,86

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Dan menyisakan sejumlah persoalan yang belum tuntas yang berdampak pada capaian target, berikut capaian kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2022 – 2024 :

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
Tahun 2022 – 2024

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					Realisasi			Status			SKPD Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	TANPA KEMISKINAN																
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.																
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINKES	%	20	20	20	20	20	20	12,9	11,75	10,86	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai	DINAS KESEHATAN
2	TANPA KELAPARAN																
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	10,7	29	18,11	16	15	14	24,6	24,6	22,9	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	10,2	10	8	7	7	6	7,2	6,8	5,9	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	17,46	20	19	18	17	16	16,4	14,44	15,62	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA																

RENSTRA DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					Realisasi			Status			SKPD Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	per 100.000 Kelahiran Hidup	205	112	111	110	109	108	136	145	146	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BPS	Persen	97,81	85,5	87	89	91	93	85,5	89,44	71	Tercapai	Tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.																
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	per 1000 KH	9	9	8	7	7	6	9	11,7	11	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	per 1000 KH	7	9	8	7	7	6	9	10	9,6	Tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	per 100.000 penduduk	252	231	211	190	170	150	151	223	286	Membaik/akan tercapai	Tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	9	10	11	12	13	13	10	10	10	Tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					Realisasi			Status			SKPD Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	per 1000 Penduduk	0,1	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,09	0,185	0,13	Membaik/akan tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	92	85	90	90	90	90	75	84	91,3	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	permil	0,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,12	0,075	0,1	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	8,14	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	5,03	6,3	5,4	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	36,6	31	30	29	28	27	30,6	26	17	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	19,5	15	14	13	12	11	14,5	16	6,16	Tercapai	Membaik/akan tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.																
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Orang	731	1153	1166	1179	1192	1206	351	1205	2744	Membaik/akan tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					Realisasi			Status			SKPD Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	74,1	76,4	76,4	76,6	76,6	76,8	76,4	78,14	75,4	Tercapai	Tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	55	49	51	52	53	55	49	47,5	64,9	Tercapai	Membaik/akan tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.																
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	8,14	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	50,3	6,3	7,7	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	Membaik/akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.																
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	99,6	92	98,5	98,6	98,7	98,8	98,8	99,2	99,2	Tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	80,6	94	94	94,5	95	95	85,7	91,2	95,77	Membaik/akan tercapai	Tercapai	Tercapai	DINAS KESEHATAN

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Indikator hasil akhir pembangunan kesehatan mencakup angka kematian (mortalitas), yang dipengaruhi oleh indikator kesakitan (morbiditas), status gizi, dan cakupan pelayanan kesehatan. Indikator utama meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Stunting, dan Angka Kesakitan.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, AKI pada tahun 2024 tercatat sebesar 146 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 145 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, jumlah kasus kematian ibu secara absolut mengalami penurunan dari 103 kasus pada tahun 2023 menjadi 83 kasus pada tahun 2024. Peningkatan AKI lebih disebabkan oleh penurunan jumlah kelahiran hidup, meskipun jumlah kematian ibu secara absolut telah berkurang.

Beberapa faktor penyebab masih tingginya AKI di provinsi ini antara lain:

1) Masih tingginya angka perkawinan usia muda yang mengakibatkan ibu tidak siap secara mental dan biologis
2) Kematian ibu akibat perdarahan,hipertensi kehamilan dan komplikasi kehamilan lainnya.
3) Kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC) yang belum optimal.
4) Persalinan yang masih dilakukan oleh tenaga non-kesehatan, seperti dukun kampung.
5) Masih terjadinya persalinan di luar fasilitas kesehatan yang tidak sesuai standar
6) Penggunaan dan pemanfaatan Buku KIA dan kelas ibu hamil yang belum optimal.
7) Sistem rujukan yang belum berjalan secara optimal.
8) Keterlambatan dalam identifikasi ibu hamil berisiko tinggi.
9) Kemitraan antara bidan dan dukun kampung yang belum sepenuhnya efektif.

Berikut gambaran Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Selatan:

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

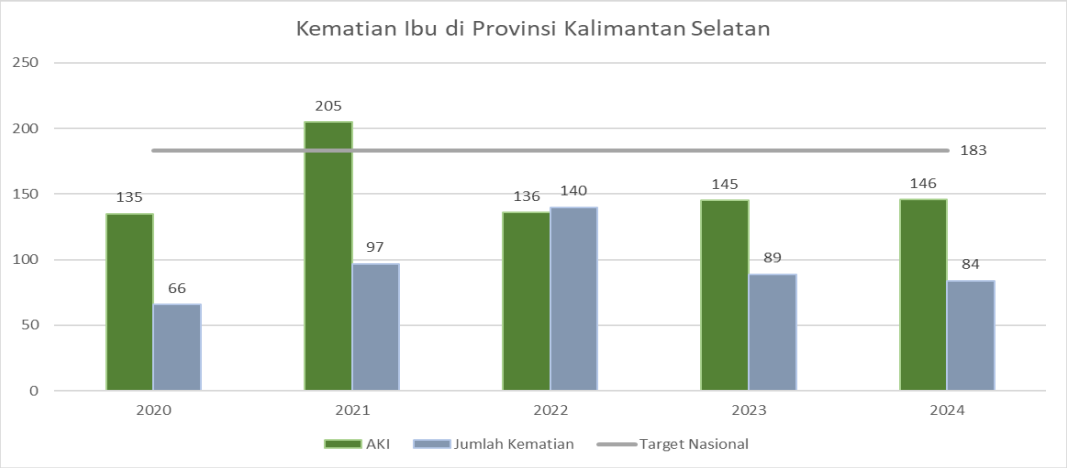

Gambar 2.6
Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d 2024

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berada pada angka 11,2 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti telah melampaui target nasional sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Kontribusi tertinggi terhadap kematian bayi berasal dari kematian neonatal (0–28 hari), yang umumnya disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelahiran prematur, asfiksia, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan neonatal berkualitas.

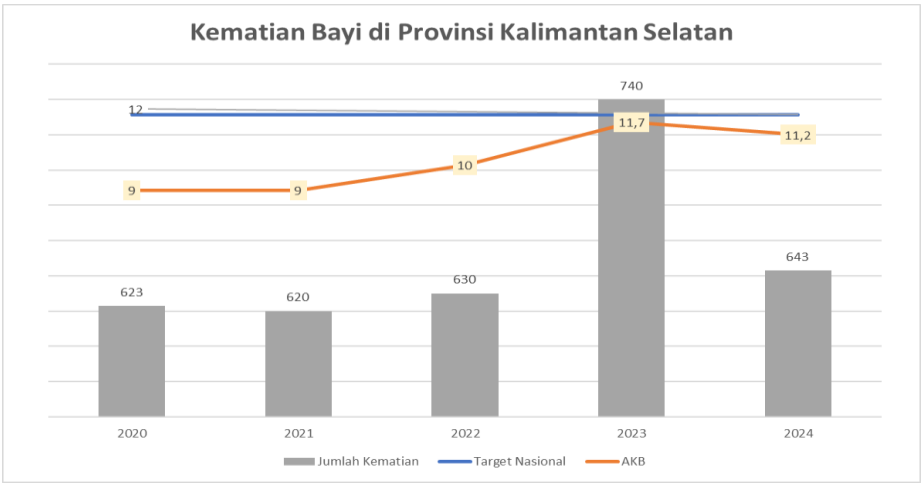

Gambar 2.7
Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d 2024

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Kematian Bayi di Kalimantan Selatan telah mencapai target Rencana Strategis, namun tentunya masih memiliki beberapa kendala untuk terus mencapai capaian yang lebih baik. Beberapa kendala dan penyebab masih adanya kematian bayi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1) Bayi yang dilahirkan mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang. Selain itu pada sama kehamilan, ibu mengalami sakit
2) Ibu masih muda sebagai implikasi terjadinya perkawinan usia muda
3) Bayi lahir pada usia 7 bulan dan mengalami asfiksia dan tidak segera ditangani dengan baik
4) Kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan praktek sesuai dengan standar untuk asuhan bayi baru lahir
5) Belum memadai fasilitas kesehatan
6) Terlambatnya dalam mengambil keputusan di tingkat keluarga dalam hal merujuk karena transportasi dan akses yang sulit sehingga mengakibatkan terlambat mendapat pertolongan saat tiba di Rumah Sakit karena sudah parah

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting berdasarkan data SSGI tahun 2024 tercatat sebesar 22,9%, menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan telah melampaui dan belum mencapai target Renstra 2024 sebesar 16%. Namun demikian, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 24,7% ada penurunan 1,8% , yang masih tergolong tinggi. Penanganan stunting dilaksanakan melalui pendekatan multisektor yang mencakup intervensi spesifik oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif oleh lintas sektor, berdasarkan lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.

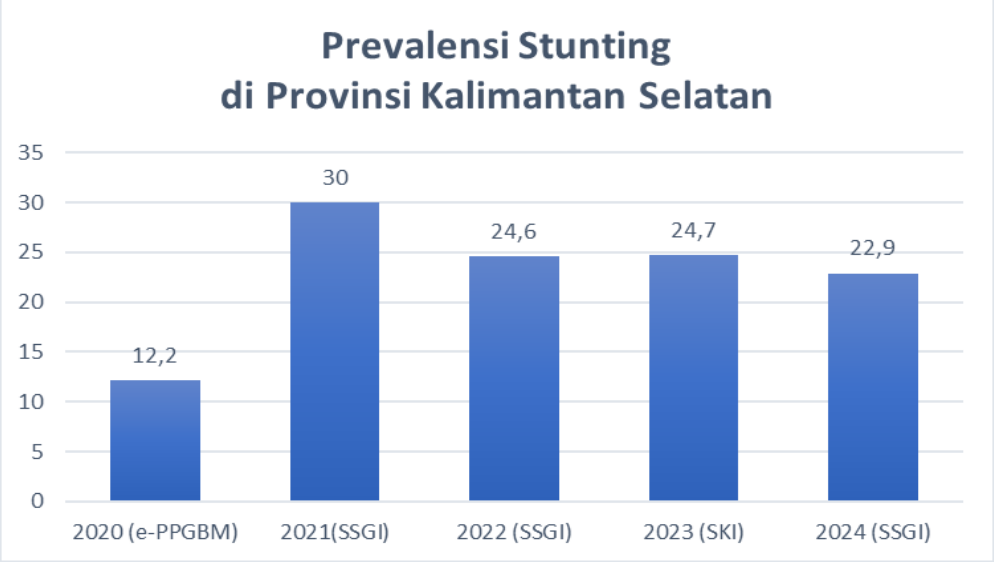

Gambar 2.8
Prevalensi Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024

d. Angka Kesakitan

Penyakit Menular

1) **Tuberkulosis:** Capaian *Treatment Coverage* meningkat dari 47% (2022) menjadi 83,9% (2024). *Success Rate* menunjukkan tren pencapaian sesuai target nasional.
2) **HIV/AIDS:** Pemeriksaan terhadap kelompok berisiko mencapai 135,29% dari target, berkat dukungan pelaksanaan survei sentinel secara periodik.
3) **Malaria:** Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria stagnan pada angka 10 dari target 11, belum memenuhi sasaran 2024.
4) **Dengue (DBD):** Persentase kabupaten/kota dengan *Incidence Rate* <10/100.000 hanya sebesar 7,7%, jauh di bawah target sebesar 35%.
5) **Kusta:** Persentase kasus baru tanpa cacat mencapai 86,11% dari target 95%, belum optimal akibat keterbatasan dukungan anggaran.
6) **Rabies:** Persentase puskesmas rujukan Rabies Center meningkat menjadi 76,92% pada 2024 dari 53,84% pada tahun sebelumnya, menunjukkan progres positif menuju eliminasi rabies.
7) **Pneumonia Anak:** Persentase puskesmas yang melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar mencapai 100% pada tahun 2024.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Penyakit Tidak Menular

Terjadi peningkatan jumlah deteksi dini kasus kanker serviks dan payudara, serta pelaksanaan pelayanan PTM terpadu, walaupun belum seluruhnya mencapai target. Deteksi dini kasus kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza telah dilaksanakan oleh 100% fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

Indikator kesehatan di Kalimantan Selatan menunjukkan pencapaian signifikan namun masih menghadapi tantangan. **AKI dan AKB menunjukkan penurunan absolut, namun rasio AKI meningkat akibat berkurangnya jumlah kelahiran hidup.** Stunting mengalami kemajuan signifikan jika merujuk pada data SSGI 2024, meskipun data lain menunjukkan hasil lebih tinggi. Pada aspek **morbiditas**, upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular membaik, walaupun eliminasi malaria dan pengendalian DBD belum optimal. Implementasi sistem kewaspadaan dini dan manajemen pneumonia menunjukkan kinerja sangat baik. Kesehatan jiwa juga telah dikelola dengan cakupan pelayanan yang maksimal. Secara keseluruhan, **Kalimantan Selatan telah menunjukkan tren positif dalam pencapaian indikator kesehatan**, namun diperlukan penguatan pada sistem rujukan, akses layanan, dan edukasi masyarakat.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, beberapa hal menjadi tantangan dan peluang antara lain :

a. Tantangan yang dihadapi :

1) Kekurangan jumlah dan pemerataan Sumber Daya Manuasia Kesehatan (SDMK) yang berkualitas yang diperparah dengan perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya.
2) Mutu dan akses ke layanan rujukan yang masih terbatas, khususnya pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
3) Adanya beban ganda penyakit di masyarakat berupa meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi disertai meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular. Terjadinya pandemi/wabah seperti COVID-19 telah

mengubah berbagai tatanan kehidupan di masyarakat dan memberikan beban ganda dan guncangan terhadap pelayanan kesehatan yang ada.

4) Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. Diperlukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat secara lebih berkesinambungan agar dapat melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sadar terhadap kesehatan pribadi, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

5) Jumlah penduduk besar menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan membutuhkan sumber daya kesehatan yang memadai, baik sarana/prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

b. Peluang

1) Perubahan nilai sosio kultural masyarakat, perubahan kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, era global digital brain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Era Revolusi Industri 4.0 menuju era 5.0, era digital brain dimana segala aspek kehidupan dikembangkan secara digital termasuk pelayanan kesehatan. Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dapat diakses secara digital, cepat, tepat, efektif dan efisien. Dampaknya, dituntut profesionalisme dan keterampilan petugas kesehatan dalam memanfaatkan teknologi canggih dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan, serta bagaimana mengembangkan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

2) Perubahan strata demografi ke umur tua. Dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat sehingga ke depan membutuhkan upaya penanganan khusus. Resiko ini perlu disikapi dengan penguatan promotif dan preventif kesehatan di samping kesiapan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.

3) Perubahan sistem kesehatan, kebutuhan penggunaan teknologi digital yang semakin luas untuk sektor kesehatan yang mencakup integrasi dan pengembangan system data kesehatan; integrasi dan pengembangan

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

aplikasi kesehatan; serta pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan, regulasi, kemudahan/fasilitasi pendampingan, pembinaan dan pengawasan, perkembangan kondisi global).

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat umum serta SKPD Dinas Kesehatan Kab/Kota, FKTP dan FKTL. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD dan UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dengan memastikan layanan dapat diakses secara merata, inklusif, dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat secara umum, tetapi juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020–2024 dan RPJPN 2025–2045, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk pada setiap tahapan kehidupan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan pada Masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bermitra dengan:

a. Kementerian Kesehatan ; Fasilitasi Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular, Kanker, Diabetes Melitus, Uronefrologi,Kesehatan Jiwa,Infeksi Emerging,Respirasi dan Tuberkulosis.antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo dan RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta, RSUP Persahatan,

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

RSUP Dr.Kariadi Semarang, RS Kanker Dharmais, RS Penyakit Infeksi Prof.DR.Sulianti Saroso dan PJKN RS JIwa dr.H.Marzoeki Mahdi;

b. BPJS ; Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan BPJS Kesehatan dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
c. SKPD Lintas Sektor Provinsi Kalimantan Selatan ; Deklarasi Loksado Komitmen bersama Penurunan Stunting dan Obesitas Bappeda, Dinas Kesehatan, TP-PKK, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.
d. Dinas Kesehatan Kab/Kota ; Penempatan tenaga kesehatan strategis di 13 Kab./Kota melalui tenaga kesehatan penugasan khusus yang dapat membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalsel
e. Akademisi/Perguruan Tinggi ; Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Banjarmasin dalam penyusunan Policy Brief antara lain Posbindu PTM, Penanganan kasus TBC dan Integrasi Layanan Primer ; Universitas Lambung Mangkurat pendampingan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Tengah 2025.
f. Organisasi Profesi ; Layanan pembuatan STR Tenaga Kesehatan.
g. NGO (PMI, YKI, KPA, Yayasan Jantung) ; organisasi Nirlaba di Kalimantan Selatan mendapatkan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan, Yayasan Kanker Indonesia Kalimantan Selatan, Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kalimantan Selatan dan Yayasan Jantung Kalimantan Selatan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dukungan dari :

a. Bank Kalsel ; CSR membantu dalam kegiatan seperti Jambore Kader Posyandu, stunting

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

b. PDAM Intan Banjar, membantu dalam menyediakan air bersih, yang berkontribusi dalam penurunan penyakit berbasis lingkungan, dan pencegahan stunting.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan isu strategis yang nantinya untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan strukural dalam upaya pemenuhan akses layanan Kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Disparitas fasilitas pelayanan Kesehatan antara perkotaan dan perdesaan, keterbatasan tenaga medis di wilayah terpencil, serta infrastruktur penunjang yang belum optimal berdampak langsung terhadap capaian indikator Kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Selatan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Selain itu, Prevalensi Stunting pada Balita juga masih menjadi perhatian serius, mencerminkan permasalahan gizi kronis yang berkaitan dengan ketidakcukupan pangan bergizi, sanitasi yang belum memadai, serta belum optimalnya edukasi dan pola asuh yang tepat.

Kondisi ini diperburuk oleh terjadinya transisi epidemiologi yang ditandai dengan pergeseran pola penyakit dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular yang kini menjadi penyumbang utama beban morbiditas dan mortalitas. Perubahan struktur demografi, khususnya peningkatan proporsi penduduk lanjut usia, mempertegas urgensi transformasi sistem pelayanan Kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotif, preventif dan manajemen penyakit kronis jangka panjang.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.6

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat pada semua kelompok usia	Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan belum Optimal	1. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. 2. Sistem rujukan belum terintegrasi dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai. 3. Infrastruktur dan peralatan medis di banyak Puskesmas dan Rumah Sakit belum sesuai standar. 4. Pemanfaatan telemedicine dan teknologi informasi kesehatan masih rendah. 5. Sistem monitoring dan evaluasi layanan belum berjalan secara sistemik dan berbasis data.
	Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak	1. Tingginya angka anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil. 2. Masih tingginya persalinan di luar fasilitas kesehatan. 3. Fasilitas dan tenaga untuk layanan kesehatan ibu dan anak masih terbatas, terutama di wilayah sulit akses. 4. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. 5. Peralatan layanan ibu dan anak di fasilitas dasar belum sesuai standar pelayanan. 6. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi
	Permasalahan Gizi pada Masyarakat yang belum tuntas	1. Akses terhadap pangan bergizi masih terbatas, khususnya di keluarga miskin dan daerah rentan pangan.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola makan sehat dan gizi seimbang. 3. Belum optimalnya pemberian ASI Eksklusif 4. Kondisi sanitasi dan air bersih masih buruk di sejumlah wilayah. 5. Program kesehatan lintas sektor (gizi, KB, sanitasi, pendidikan) belum terintegrasi secara sinergis. 6. Pengetahuan orang tua mengenai pola asuh dan kesehatan anak masih rendah.
	Beban Penyakit yang Tinggi, baik Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular	1. Belum optimalnya deteksi dini dan penanganan penyakit tidak menular di layanan primer. 2. Ancaman penyakit menular yang terus berkembang dan munculnya penyakit baru akibat perubahan lingkungan 3. Masih tingginya beban penyakit menular seperti DBD, TBC, dan penyakit zoonosis. 4. Terjadi pergeseran beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seiring perubahan demografi belum diimbangi dengan Penguatan Layanan Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular 5. Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi gula/garam, diet tidak seimbang, dan kurang aktivitas fisik 6. Meningkatnya jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti : Polio, Campak, dan Hepatitis B. 7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan perilaku hidup bersih dan sehat.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		8. Masih adanya stigma terhadap imunisasi di masyarakat
	Kesenjangan Akses dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan (Obat, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	1. Tenaga kesehatan di daerah terpencil belum mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. 2. Disparitas distribusi dan insentif tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi. 3. Ketersediaan obat, alat kesehatan, dan vaksin belum merata di seluruh fasilitas kesehatan. 4. Pendanaan kesehatan belum sepenuhnya mendukung pemerataan dan penguatan layanan primer. 5. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan belum menyesuaikan kebutuhan pelayanan primer. 6. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam alokasi sumber daya.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

2.2.2 Telaahan terhadap RPJMN 2025-2029

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Republik Indonesia tahun 2025 – 2029, berikut ini adalah Visi Presiden Republika Indonesia :

“ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung makna pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra terbaik bangsa dengan kebersamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan indonesia setara negara maju di tahun 2045, visi ini dicapai melalui delapan Misi presiden yang dituangkan dalam Asta Cita :

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Asta Cita yang ke Empat Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

2.2.3 Telaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahap I RPJPD dan RPJMD 2025-2029 yakni memiliki tema Penguatan Fondasi Transformasi yang meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Visi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dibuat

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bekerja menuntaskan permasalahan pembangunan di semua sektor. Visi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu

"Kalsel Bekerja (Kalimantan Selatan Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan Selatan."

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.
b. BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
c. BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.
d. RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
e. SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
f. GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen

Selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (Lima) Misi, yaitu :

1. **Pembangunan Manusia yang Unggul, berbudaya, dan Berakhlak Mulia**,dengan penjelasan Pembangunan Sumber Daya Manusia selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai nilai hidup yang luhur, berbudaya dan berakhlak mulia.
2. **Pembangunan Infrastruktur yang Handal,** dengan penjelasan Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta terkoneksi dengan wilayah lain.

3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah.** Dengan penjelasan Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul.
4. **Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim,** dengan penjelasan Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
5. **Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat,** dengan penjelasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah dengan dokumen perencanaan makro. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan terdapat pada Misi 1: *"Pembangunan Manusia yang Unggul,*

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Berbudaya dan Berakhlak Mulia", dan Misi 5: *"Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat."*

Dalam kerangka misi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya pengembangan layanan kesehatan berbasis wilayah, dengan prioritas pada kawasan permukiman padat penduduk, daerah terpencil, dan wilayah dengan angka beban penyakit tinggi. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan determinan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, ditetapkan arahan penataan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Dimana tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah paling kecil di Pulau Kalimantan dan secara struktur astronomi terletak pada titik koordinat -114 19” 33” Bujur Timur – 116 33” 28 Bujur Timur dan -1 21’ 49” Lintang Selatan -1 10” 14”Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan secara Administrasi berbatasan dengan :

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, dan
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.280,39 km2 yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 152 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan.

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui teknik kebijakan perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk mensinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kabupaten/kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan fungsi layanan kesehatan memperhatikan peningkatan fungsi kawasan utamanya pada pemukiman penduduk dimana layanan kesehatan tersebut dibutuhkan. Secara teknis, terdapat tiga komponen utama yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan, yaitu:

1) Faktor Lingkungan

   Faktor lingkungan mencakup dua dimensi utama:

   - **Lingkungan fisik**: mencakup kualitas air, udara, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Lingkungan yang tercemar secara langsung meningkatkan risiko penyakit menular dan tidak menular.
   - **Lingkungan sosial**: termasuk kondisi perumahan, keamanan sosial, kohesi masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi yang mempengaruhi persepsi serta akses terhadap layanan kesehatan.

2) Faktor Perilaku Masyarakat

   Perilaku individu dan kolektif masyarakat memiliki korelasi kuat terhadap status kesehatan. Faktor ini meliputi:

   - **Kebiasaan hidup** seperti pola konsumsi makanan, aktivitas fisik, serta perilaku berisiko (merokok, konsumsi alkohol, dan lain-lain).

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

- **Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi**: masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas tentang prinsip dasar PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
- **Nilai budaya dan kepercayaan lokal** yang dapat menjadi penghambat atau pendukung penerapan intervensi kesehatan masyarakat.

3) Faktor Pelayanan Kesehatan

Efektivitas sistem kesehatan sangat ditentukan oleh aspek ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan:

- **Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan** menjadi indikator utama dalam pemerataan akses.
- **Kualitas pelayanan** ditentukan oleh standar pelayanan minimal (SPM), akreditasi fasilitas, dan efisiensi manajemen.
- **Keterjangkauan biaya dan lokasi** turut menjadi tantangan dalam wilayah-wilayah dengan hambatan geografis.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan pendekatan integratif melalui empat pilar utama pelayanan kesehatan:

- **Promotif dan Preventif**: penguatan edukasi kesehatan berbasis komunitas dan peningkatan cakupan imunisasi serta skrining penyakit menular dan tidak menular.
- **Kuratif dan Rehabilitatif**: peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan rujukan, serta penguatan layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan sistem kesehatan.

Dengan mengintegrasikan berbagai faktor tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta memperkuat ketahanan

kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan dinamika demografi.

2.2.5 Internalisasi dan Dukungan terhadap SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, Tujuan SDGs tertuang dalam Perpres No. 111 Tahun 2022. Terdapat 4 Pilar dalam SDGs, dan bidang kesehatan ada dipilar Sosial. Pilar Sosial dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. **Tanpa Kemiskinan**

   Merupakan tujuan pertama SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Indikator kesehatan terkait dengan hal ini adalah Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN.

2. **Tanpa Kelaparan**

   Merupakan tujuan kedua SDGs ini yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Indikator kesehatan terkait yaitu Prevalensi Stunting, Prevalensi Wasting, dan Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.

3. **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

   Tujuan ketiga pada SDGS ini yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Indikator kesehatan yang terkait dengan hal ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB), Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria, Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta, Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko; Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk, Persentase kasus kusta baru tanpa cacat, Kejadian malaria per 1000 orang, Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, Prevalensi tekanan darah tinggi, Prevalensi Obesitas pada

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

penduduk umur > 18 tahun, Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis, Persentase Faskes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia produktif, Cakupan jaminan kesehatan nasional, Cakupan pelayanan kesehatan esensial, Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas.

Berikut Indikator SDGs yang diampu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan :

Tabel 2.7

Indikator SDGs Metadata II

Kode Indikator	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program
1	TANPA KEMISKINAN	
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2	TANPA KELAPARAN	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	

Kode Indikator	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Kode Indikator	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Kode Indikator	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2.2.6 Perumusan Isu Strategis

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Penentuan isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.

Isu Strategis Utama dalam Kesehatan adalah “Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat”. Isu strategis tersebut mempunyai permasalahan utama yang mendasari capaian pembangunan kesehatan yaitu :

1) Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat (Layanan Dasar dan Rujukan) yang belum optimal;
2) Masih rendahnya efektivitas deteksi dini dan penanganan penyakit akibat keterbatasan sistem pelayanan kesehatan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit;
3) Masih Tingginya Prevalensi Malnutrisi (Ketidakseimbangan Gizi)
4) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan, serta belum meratanya distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah;
5) Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara optimal dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan
6) Masih terbatasnya literasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi menghambat peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan..

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

7) Belum optimalnya integrasi sistem deteksi, kapasitas respon cepat, dan manajemen KLB menjadi tantangan dalam menghadapi potensi ancaman kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.8

Perumusan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	LOKAL	
1. Jaringan Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan UKBM); 2. SDM Kesehatan Lokal dan Kader Kesehatan; 3. Dukungan Pemerintah Desa dan Pendanaan Dana Desa; 4. Ketersediaan Teknologi dan Inovasi Digital Kesehatan; 5. Jejaring Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan tingginya AKI dan AKB serta Prevalensi Sunting; 2. Beban Penyakit Ganda akibat Transisi Epidemiologi dari Penyakit Menular ke Peningkatan Penyakit Tidak Menular seiring dengan Perubahan Demografi; 3. Ancaman Penyakit Menular yang terus Berkembang dan Munculnya Penyakit Baru Akibat Perubahan Lingkungan; 4. Distribusi Fasilitas dan Tenaga Kesehatan belum merata, terutama di Daerah Terpencil dan Tertinggal; 5. Sistem Rujukan belum optimal terintegrasi dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai; 6. Sistem monitoring dan evaluasi layanan belum berjalan secara sistemik dan berbasis data; 7. Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pola Makan Sehat dan Gizi Seimbang; 8. Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi gula/garam, diet tidak seimbang, dan kurang aktivitas fisik; 9. Meningkatnya jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti : Polio, Campak, dan Hepatitis B; 10. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Pemeriksaan Kesehatan Rutin dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11. Disparitas Distribusi dan Insentif Tenaga Kesehatan antara Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Masih Tinggi; 12. Masih Adanya Stigma Terhadap Imunisasi di Masyarakat	**1. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim;** **2. Alih Fungsi Lahan;** **3. Ekonomi Hijau;** **4. Ketahanan Pangan**	1. Perubahan iklim, peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana; 2. Penyakit infeksi dan Pendemi Global; 3. Krisis Pangan dan Malnutrisi	1. Masih Tingginya Masalah Kesehatan Dasar seperti, Malnutrisi, Kesehatan Ibu, Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Transisi Epidemiologi; 2. Minimya Tingkat Literasi Masyarakat Khususnya untuk Pendidikan Kesehatan; 3. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masih Kurang Optimal dan Timpang di Berbagai Daerah; 4. Risiko Ancaman Kesehatan di Masa Mendatang Akibat Perubahan Iklim dan Juga Potensi Adanya Pendemi; 5. Pembiayaan dan Belanja Kesehatan yang Masih Belum Optimal; 6. Minimnya Inovasi untuk dapat memberikan Layanan Kesehatan yang lebih Optimal	1. Belum Optimalnya Upaya Promotif dan Preventif serta Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 2. Permasalahan Gizi Masyarakat Masih belum Tuntas; 3. Masih Tingginya Penyakit Tular Vektor dan Penyakit Berbasis Lingkungan; 4. Belum Optimalnya Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; 5. Layanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang belum optimal; 6. Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan reproduksi	Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Penetapan tujuan merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan pembangunan kesehatan dengan berdasarkan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

Misi 1	Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.** Kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.

Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam mendukung tercapainya tujuan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan 2 Sasaran Utama yaitu :

1. **Sasaran Kesatu :**

   Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan

   Indikator tercapainya sasaran ini adalah :

   a) Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita
   b) Angka Kematian Ibu (AKI)
   c) Angka Kematian Balita (AKBa)
   d) Angka Kesakitan

2. **Sasaran Kedua :**

   Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

   Indikator tercapainya sasaran ini adalah :

   a) Indeks Pelayanan Publik
   b) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   d) Jumlah Inovasi
   e) Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**		**Umur Harapan Hidup (UHH)**	**Angka**	**74,18**	**74,42**	**74,66**	**74,91**	**75,15**	**75,39**	**75,64**	
			Prevalensi Stunting	**Persen**	**22,9**	**21,6**	**19,5**	**18,88**	**18,25**	**17,63**	**16,83**	
		S.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persen	12,00	11,20	10,5	9,80	9,20	8,60	8,02	
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	146	189	172	154	137	119	102	
			Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	Angka	11,6	11,3	11,2	10,8	10,5	10,3	10	
			Angka Kesakitan	Angka	5	5,4	5,3	5.00	4,95	4,9	4,8	
		S.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,05	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Persentase	89,3	89.30	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	0	2	2	2	2	2	2	
			Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Indeks	3	3	3,09	3,18	3,30	3,45	3,60	
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

3.3. Strategi

Strategi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan. Kelima tahapan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Pemenuhan Gizi Masyarakat Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penguatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Pemenuhan Gizi Masyarakat Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penguatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Pemenuhan Gizi Masyarakat Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penguatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Pemenuhan Gizi Masyarakat Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan rasio jumlah penduduk Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai Standar	Penguatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Pemenuhan Gizi Masyarakat Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan rasio jumlah penduduk Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai Standar Penggunaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis Digital

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target dan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.5. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	KET.
1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Upaya Promotif-Preventif dan Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat, termasuk Olahraga	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kemitraan lintas sektor di tingkat daerah provinsi dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat pada program promotif dan preventif bidang kesehatan	
			Meningkatkan jangkauan dan efektivitas pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat di tingkat provinsi sebagai upaya promotif dan preventif untuk mendorong perubahan perilaku menuju hidup sehat.	
			Meningkatkan kapasitas, keterjangkauan, dan keberlangsungan layanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi kader, dan dukungan lintas sektor guna mendukung pelayanan promotif dan preventif di tingkat masyarakat	
		Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektoral dan rekayasa lingkungan habitat vektor	Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang menyasar langsung kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita), serta memperkuat intervensi sensitif melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi	
			Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui penguatan peran puskesmas dan posyandu serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
			Mendorong sinergi lintas sektor melalui penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis data.	
			Mengembangkan strategi komunikasi perubahan perilaku melalui	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	KET.
			pemberdayaan kader, tokoh masyarakat, dan media lokal.	
			Mengintegrasikan upaya pengendalian malaria dengan pendekatan rekayasa lingkungan habitat vektor, penguatan surveilans, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah endemis.	
			Meningkatkan Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tular Zoonotik dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	
		Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan Kompetensi sesuai Standart di Fasilitas Layanan Kesehatan	
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan resertifikasi berbasis kompetensi	
		Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis	Penguatan Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Pengembangan Standar Pelayanan Yang Berkualitas	
			Mendorong diversifikasi spesialisasi medis sesuai dengan kebutuhan beban penyakit lokal, termasuk penguatan rumah sakit daerah dalam pelayanan spesialis dan subspesialis	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi	Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak	
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	
			Mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi dalam layanan pendidikan dan komunitas berbasis budaya lokal	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi urusan wajib kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka program dan kegiatan dipusatkan pada upaya-upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dilakukan pemutakhiran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

4.1. Uraian Program

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan Rencana Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 sebanyak 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.2. Uraian Kegiatan

4.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, didukung oleh kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD

4.2.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, didukung oleh kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

4.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, didukung oleh kegiatan :

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.2.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, didukung oleh kegiatan :

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
2. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

4.2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, didukung oleh kegiatan :

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Provinsi
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.3.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
6. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah

4.3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

4.3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4.3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4.3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, didukung oleh sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4.3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,didukung oleh sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4.3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung oleh sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.3.9. Peningkatan Pelayanan BLUD, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

4.3.10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
6. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
9. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
10. Pengembangan Rumah Sakit

4.3.11. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan:

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMKJ)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
15. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
18. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
19. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
20. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
21. Penyediaan dan Pengelolaan sistem Penanganan gawatdarurat terpadu
22. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
24. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

4.3.12. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.3.13. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

4.3.14. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.3.15. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan:

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.3.16. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK

4.3.17. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), didukung oleh sub kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

4.3.18. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.3.19. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4.3.20. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

Adapun dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan Sasaran RPJMD, tujuan dan sasasan Renstra dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**				**Umur Harapan Hidup (UHH)** **Prevalensi Stunting**		
		S.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan			1) Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita 2) Angka Kematian Ibu (AKI); 3) Angka Kematian Balita (AKBa); 4) Angka Kesakitan		
			OC. 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar		1) Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita 2) Persentase Persalinan di Fasyankes 3) Angka Kematian Neonatal 4) Angka Kematian Bayi 5) Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
				OT. 1.1.1. Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak serta Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 2) Persentase Anemia pada Ibu Hamil 3) Presentase Ibu Hamil ANC 6 kali 4) Presentase Kunjungan Neonatal Lengkap 5) Persentase sekolah mendapatkan skrining kesehatan	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	
				OT. 1.1.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	1) Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan 2) Persentase sekolah mendapatkan skrining kesehatan 3) Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas 4) Persentase lanjut usia yang mandiri 5) Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal 6) Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktivitas fisik 7) Persentase Usia Produktif yang diperiksa oleh BKOM yang memiliki tingkat kebugaran baik 8) Persentase MoU yang ditindaklanjuti sampai dengan implementasI 9) Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA**	
				OT. 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	1) Persentase kabupaten kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis > 80% 2) Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga**	
				OT. 1.1.4. Meningkatnya Layanan Kesehatan Tradisional	Persentase Kab/kota dengan Tata Kelola Kesehatan Tradisional yang Baik		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**	
				OT. 1.1.6. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil melalui Layanan Kesehatan Bergerak	Jumlah kab melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di desa terpencil dan sangat terpencil	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	**Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.2. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		1) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap 2) Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria 3) Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 4) Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV 5) Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 6) Kabupaten Kota yg Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas 7) Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah 8) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 9) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
				OT. 1.2.1. Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Tular Zoonotik dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1) Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC); 2) Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC pada orang kontak serumah; 3) Persentase ODHIV yang Mengetahui Statusnya; 4) Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal Cacingan; 5) Proporsi Kusta Baru Tanpa Disabilitas 6) Penurunan angka kematian Dengue 7) Annual Paracite Incidence (API) < 1; 8) Cakupan pemberian oralit dan zinc pada balita diare sesuai standar 9) Cakupan Deteksi Dini (Skrining) Hepatitis B pada Ibu Hamil; 10) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); 11) Persentase Merokok Usia 10 -21 Tahun; 12) Cakupan Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim Bagi Perempuan Usia 30-69 Tahun; 13) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur > 18 tahun (keatas); 14)Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15) Persentasi Cakupan deteksi dini gangguan indera (Penglihatan dan Pendengaran) pada populasi target; 16) Kabupaten/kota yang Puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu PTM pada minimal 80% kunjungan Puskesmas; 17) Jumlah Kabupaten /Kota yang melakukan skrining DM > 60%; 18) Jumlah Kabupaten/kota dengan kualitas air minum pada sarana air minum yang memenuhi syarat;		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					19) Kabupaten/kota sehat;		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	
				OT. 1.2.3. Meningkatnya Cakupan dan Mutu Pelayanan Imunisasi yang Merata dan Berkelanjutan pada seluruh Tingkat Fasilitas Kesehatan	1) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target kinerja PD3I; 2) Cakupan imunisasi antigen baru 3) Cakupan imunisasi lengkap pada baduta 4) Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar 5) Cakupan imunisasi HVP	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	**Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota**	
				OT. 1.2.4. Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	1) Persentase kasus Potensial KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi; 2) Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Peta Risiko Krisis; 3) Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Penunjang Layanan KLB/Epidemi Kesehatan dan kedaruratan kesehatan Masyarakat; 4) Persentase Penanganan Sistem Kegawatdaruratan; 5) Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%; 6) Pemetaan dan Rekomendasi Penyakit Infeksi Emerging	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota**	
					jumlah Publick safety (psc119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawatdarurat terpadu (spgdt)	**Penyediaan dan Pengelolaan sistem Penanganan gawatdarurat terpadu**	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional**	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	**Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan**	
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.3. Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		1) Persentase Rumah Sakit terakreditasi; 2) Persentase FKTP terakreditasi Paripurna 3) Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna 4) Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional 5) Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar 6) Nilai akreditasi Rumah Sakit Provinsi 7) Persentase pasien keluar sembuh/mandiri 8) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT. 1.3.1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	1) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit 2) Persentase Sarana Medik dan Non Medik Sesuai Standar 3) Persentase Fasyankes dengan Alat Kesehatan sesuai Standar 4) Persentase Keberhasilan PTI Pengobatan karies gigi 5) Jumlah fasyankes yang menyediakan konsultasi jarak jauh antar failitas Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan telemedisin 6) Persentase ketersediaan jenis Layanan Kimia Patologi sesuai standart 7) Persentase Ketersediaan Jenis Layanan Kimia Kesehatan sesuai Standar 8) Persentase ketersediaan jenis Layanan Mikrobiologi sesuai standar	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit**	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	**Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	**Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit**	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	**Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	**Pengembangan Rumah Sakit**	
				OT. 1.3.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	1) Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu dan Kriteria Lainnya yang Terpenuhi Layanan Kesehatan; 2) Persentase tempat tidur yang dimanfaatkan (BOR) 3) Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Khusus 5) Persentase Puskesmas dan Klinik yang Terakreditasi; 6) Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Verifikasi Kelayakan sesuai Standart 7) Persentase fasyankes lainnya dalam melaksanakan program prioritas 8) Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% puskesmas sesuai standar SPA; 9) Persentase Keaktifan Fasyankes Rumah Sakit dalam pemanfaatan SIRS Online 10) Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi dengan Rekam Medik Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan satu sehat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	**Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan**	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	**Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas**	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	**Operasional Pelayanan Rumah Sakit**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT. 1.3.1. Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	1) Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi 2) Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan pencatatan dan pelaporan dengan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	
				OT. 1.3.1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Penguatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	1) Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi 2) Jumlah Fasyankes Melaporkan Penyelenggaraan Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) 3) Jumlah Puskesmas dan Klinik yang Terakreditasi 4) Jumlah Puskesmas dan Klinik Melaporkan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) melalui DFO 5) Persentase Respon Time SISRUTE Rumah Sakit 6) Jumlah Laboratorium Kesehatan dan Unit Pengelola Darah Terakreditasi 7) Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat, BMHP dan vaksin sesuai standar 8) Persentase Kegiatan Komite Mutu Berjalan sesuai Standar 9) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Rasio Tempat Tidur 2:1000 10) Persentase Jenis Pemeriksaan yang Terakreditasi sesuai Standar Mutu	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	**Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit**	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.5. Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan		1) Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart; 2) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan;	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
				OT. 1.4.1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan serta tenaga medis sesuai standar kompetensi pada fasilitas pelayanan kesehatan	1) Persentase Puskemas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standart; 2) Persentase RS dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standart	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	**Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
				OT. 1.4.2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar	1) Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan 2) Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Kompetensi 3) Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 4) Persentase Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pelatihan 5) Persentase pelatihan prioritas yang diidentifikasi dalam pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) 6) Persentase pemenuhan unsur dan komponen akreditasi institusi 7) Persentase Pelatihan yang terakreditasi oleh Kementerian/Lembaga 8) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pasca Pelatihan	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	**Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.4. Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba		1) Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standar 2) Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
				OT. 1.5.1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	1) Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 3) Persentase saryanfar yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 4) Persentase kab/kota yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional 5) Persentase sarana kefarmasian yang melakukan pengelolaan dan pelaporan narkotika dan psikotropika sesuai standar 6) Persentase kesesuaian realisasi pengadaan obat dan vaksin terhadap RKO dengan vaksin 7) Persentase Kab/Kota dengan Pemenuhan Obat dan Vaksin Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	**Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan**	
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.6. Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan		1) Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT. 1.6.1. Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT	1) Persentase Cabang DAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan, tindak lanjut penerbitan perizinan dan tindak lanjut pengawasan 2) Persentase PKRT yang memenuhi ketentuan perizinan sesuai standart 3) Presentase Kabupaten / kota yang melakukan pengendalian dan pengawasan PKRT sesuai ketentuan Perizinan 4) Persentase sarana distribusi kefarmasian yang melakukan pengelolaan dan pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT sesuai standar	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	
					Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	**1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK**	
				OT. 1.6.2. Meningkatnya Kualitas Obat Tradisional	Persentase UKOT yang Dikendalikan dan Diawasi Dalam Rangka Perizinan Berusaha Sesuai Standar	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	
					Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	**1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK**	
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			OC. 1.7. Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan		Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT. 1.5.1. Meningkatnya Efektivitas Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemitraan Lintas Sektor dalam Program Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan.	1. Persentase kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif 2. Persentase kader posyandu strata madya 3. Persentase Puskesmas yang mempunyai Pangkalan Saka Bakti Husada	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	**Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	
				OT.1.5.2. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Upaya Promotif dan Preventif.	1. Cakupan Indikator PHBS;	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT. 1.5.3. Meningkatnya Kapasitas, Keterjangkauan, dan Keberlangsungan Layanan UKBM dalam Mendukung Pelayanan Promotif dan Preventif di Tingkat Masyarakat	Persentase UKBM Aktif	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	**Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM**	
		S.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			1. Nilai SAKIP 2. Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 3. Jumlah Inovasi 4. Indeks Maturitas SPIP 5. Indeks Pelayanan Publik		
			OC.2.1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD		1) Persentase Kegiatan Tepat Waktu; 2) Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu; 3) Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal; 4) Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti; 5) Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat; 6) IKM Layanan BLUD; 7) Nilai Pendapatan Daerah BLUD; 8) IKM Layanan UPT; 9) Nilai Pendapatan UPT.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
				OT.2.1. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu;	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD**	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			**Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			**Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah**	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	
				OT.2.2. Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	
				O.T.2.3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	
				OT.2.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				O.T.2.5 Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1) Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan**	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Pengadaan Mebel**	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	
				Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	**Pemeliharaan Mebel**	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase capaian target pendapatan (UPT/BLUD/BUD RS)	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	

Program dan kegiatan disusun dalam kurun waktu lima tahun rencana disertai dengan rencana capaian kinerja program maupun kegiatan. Pada Renstra 2025 – 2029 baik capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun sampai dengan tahun 2030 hal dimaksud bertujuan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, seperti terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.029.393.054.685		1.548.717.749.116		1.554.449.520.757		1.584.542.280.585		1.601.681.799.072		1.620.443.579.330	
Tujuan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,18	74,42		74,66		74,91		75,15		75,39		75,64		
	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6		19,5		18,88		18,25		17,63		16,83		
Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persen	12,00	11,20		10,5		9,80		9,20		8,60		8,02		
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	146	189		172		154		137		119		102		
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	Angka	11,6	11,3		11,2		10,8		10,5		10,3		10		
	Angka Kesakitan	Angka	5	5,4		5,3		5.00		4,95		4,9		4,8		
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					152.413.086.807		148.197.166.284		148.746.488.720		151.625.224.140		153.265.308.702		155.060.627.876	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita	Persen	SKI 2023: 21,5%	20,10	14.048.207.283	18,80	6.727.525.782	17,60	6.752.462.703	16,40	6.883.145.139	15,40	6.957.598.055	14,37	7.039.097.968	
	Persentase Persalinan di Fasyankes	Persen	71,75	n/a		89		90		91		92		93		
	Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	Angka	9,6	9,2		8,4		8		7,8		7,2		7		
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	Angka	11,2	10,9		10,4		9,9		9,4		8,9		8,4		
	Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia	Kab/Kota	5	5		7		9		11		13		13		
1.02.02.1.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					192.539.758		280.176.232		281.214.761		286.657.195		289.757.880		293.152.045	
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil melalui Layanan Kesehatan Bergerak	Jumlah kab melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di desa terpencil dan sangat terpencil	Kab/Kota	2	2	192.539.758	2	280.176.232	3	281.214.761	3	286.657.195	3	289.757.880	3	293.152.045	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.01.0006. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	2	2	192.539.758	2	280.176.232	3	281.214.761	3	286.657.195	3	289.757.880	3	293.152.045	
1.02.02.1.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					13.855.667.525		6.447.349.550		6.471.247.942		6.596.487.944		6.667.840.175		6.745.945.923	
Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak serta Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persen	Data rutin 2024: 12,1%	11,3	9.727.077.900	10,6	2.801.243.700	9,9	2.811.627.072	9,2	2.866.041.333	8,6	2.897.042.442	8,1	2.930.977.820	
	Persentase Anemia pada Ibu Hamil	Persen	Data rutin 2024: 87%	89		91		92		93		94		95		
	Presentase Ibu Hamil ANC 6 kali	persen	N/A	80		82		85		88		90		93		
	Presentase Kunjungan Neonatal Lengkap	persen	86	91		92		93		94		95		95		
	Persentase Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan	persen	N/A	88		90		92		94		95		97		
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	2.468.688.200	2	1.336.561.700	2	1.341.515.935	2	1.367.478.694	2	1.382.270.300	2	1.398.461.940	
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	7.258.389.700	1	1.464.682.000	1	1.470.111.137	1	1.498.562.639	1	1.514.772.142	1	1.532.515.880	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	persen	N/A	50	3.583.923.800	55	2.955.945.400	60	2.966.902.202	65	3.024.321.551	70	3.057.034.732	72	3.092.844.223	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan	persen	N/A	88		90		92		94		95		97		
	Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	N/A	35		45		55		65		75		78		
	Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	94%	75		77		79		81		83		85		
	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	Unit	240	252		262		272		282		292		300		
	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktivitas fisik	persen	N/A	40		50		60		65		70		75		
	Persentase Usia Produktif yang diperiksa oleh BKOM yang memiliki tingkat kebugaran baik	persen	N/A	70		75		80		85		90		95		
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti sampai dengan implementasl	persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	persen	N/A	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	1	885.974.600	1	573.893.300	1	576.020.550	1	587.168.449	1	593.519.675	1	600.472.045	
1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	1	505.357.400	1	122.595.500	1	123.049.925	1	125.431.347	1	126.788.100	1	128.273.270	
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	666.340.000	1	825.192.000	1	828.250.739	1	844.280.124	1	853.412.450	1	863.409.152	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1.281.592.600	1	1.216.459.500	1	1.220.968.550	1	1.244.598.321	1	1.258.060.767	1	1.272.797.440	
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	1	190.585.100	1	122.752.800	1	123.207.808	1	125.592.285	1	126.950.780	1	128.437.856	
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang	2744	2744	54.074.100	2744	95.052.300	2744	95.404.630	2744	97.251.025	2744	98.302.960	2744	99.454.460	
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	Persentase kabupaten kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis > 80%	persen	N/A	40	213.970.850,00	60	371.706.850	70	373.084.656	80	380.305.075	90	384.418.721	95	388.921.725	
	Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar	persen	N/A	20		30		40		60		75		80		
1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	926532	927326	213.970.850,00	1253883	371.706.850	1253883	373.084.656	1253883	380.305.075	1253883	384.418.721	1253883	388.921.725	
Meningkatnya Layanan Kesehatan Tradisional	Persentase Kab/kota dengan Tata Kelola Kesehatan Tradisional yang Baik	Persen	10	20	330.694.975	30	318.453.600	40	319.634.012	60	325.819.985	80	329.344.280	100	333.202.155	
1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	330.694.975	1	318.453.600	1	319.634.012	1	325.819.985	1	329.344.280	1	333.202.155	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)			(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	81,78	85	10.017.240.470	88	8.100.856.700	91	8.130.884.144	93	8.288.243.584	95	8.377.895.030	95	8.476.032.014	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	75,2	88		88,68		89,36		90,04		90,72		91,4		
			Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV	Persen	62	74		80		87		94		95		95		
			Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	Kabupaten /Kota	11	12		12		12		13		13		13		
			Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kabupaten /Kota	0	0		3		4		5		7		8		
			Kabupaten/Kota yg Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas	Kabupaten /Kota	5	6		7		8		9		10		11		
			Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	Kabupaten /Kota	7	8		9		10		11		12		13		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.02.1.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					10.017.240.470		8.100.856.700		8.130.884.144		8.288.243.584		8.377.895.030		8.476.032.014	
Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Tular Zoonotik dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC);	Persen	8,2%	72%	3.202.169.600	80%	3.066.337.450	80%	3.077.703.443	80%	3.137.267.161	80%	3.171.202.038	80%	3.208.348.865	
	Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC pada orang kontak serumah	Persen	8,2%	72%		80%		80%		80%		80%		80%		
	Persentase ODHIV yang Mengetahui Statusnya.	Persen	77%	84%		87%		91%		95%		96%		96%		
	Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal Cacingan	Persen	90%	92%		94%		96%		97%		98%		99%		
	Proporsi Kusta Baru Tanpa Disabilitas	persen	80%	86%		87%		88%		89%		90%		100%		
	Penurunan angka kematian Dengue	persen	N/A	0,5%		0,4%		0,3%		0,2%		0,1%		0,1%		
	Annual Paracite Incidence (API) < 1	permil	< 1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
	Cakupan Pemberian Oralit dan Zinc pada Balita Diare (Sesuai Standar)	Persen	95%	96%		97%		98%		99%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Cakupan Deteksi Dini (Skrining) Hepatitis B pada Ibu Hamil	Persen	64%	70%		75%		80%		85%		90%		100%		
	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	13	13		13		13		13		13		13		
	Persentase Merokok Usia 10 - 21 Tahun	Persen	N/A	12,4		3,8		3,8		3,5		3,5		3,2		
	Cakupan Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim Bagi Perempuan Usia 30-69 Tahun	Persen	29	32		32,5		33		33,5		34		34,5		
	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur > 18 tahun (keatas)	Persen	7	12		11		11		11		10		10		
	Persentasi Cakupan deteksi dini gangguan indera (Penglihatan dan Pendengaran) pada populasi target	Persen	60	70		70		70		70		70		70		
	Kabupaten/kota yang Puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu PTM pada minimal 80% kunjungan puskesmas	Kab/Kota	13	3		4		5		8		10		11		
	Jumlah Kabupaten /Kota yang melakukan skrining DM > 60%	Kab/Kota	N/A	2		4		6		8		10		13		
	Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	Kab/Kota	5	7		8		9		10		11		13		
	Kabupaten/kota sehat	Kab/Kota	7	8		9		10		11		12		13		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1.664.336.800	1	663.245.800	1	665.704.253	1	678.587.827	1	685.927.908	1	693.962.730	
1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1.537.832.800	2	2.403.091.650	2	2.411.999.190	2	2.458.679.334	2	2.485.274.130	2	2.514.386.135	
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Pelayanan Imunisasi yang Merata dan Berkelanjutan pada seluruh Tingkat Fasilitas Kesehatan	Cakupan imunisasi antigen baru	Persen	N/A	65	349.705.000	71	449.999.000	77	451.667.011	84	460.408.258	90	465.388.357	90	470.839.822	
	Cakupan Imunisasi HPV	Persen	60	90		90		90		90		90		90		
	Cakupan imunisasi lengkap pada baduta	Persen	81,08	82		85		87		90		92		95		
	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	Persen	71,4	72		75		80		85		90		95		
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target kinerja PD3I	Kab/Kota	77	86		87		88		89		90		90		
1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	349.705.000	1	449.999.000	1	451.667.011	1	460.408.258,00	1	465.388.357,00	1	470.839.822,00	
Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Persentase kasus Potensial KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	persen	100	100	6.465.365.870	100	4.584.520.250	100	4.601.513.690	100	4.690.568.165	100	4.741.304.635	100	4.796.843.327	
	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Peta Risiko Krisis	Kab/Kota	8	9		10		11		12		13		13		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Penunjang Layanan KLB/Epidemi Kesehatan dan kedaruratan kesehatan Masyarakat;	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Sistem Kegawatdaruratan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Kab/Kota	13	13		13		13		13		13		13		
	Kabupaten/Kota yang mencapai target kinerja PD3I	Kab/Kota	77	86		87		88		89		90		90		
	Pemetaan dan Rekomendasi Penyakit Infeksi Emerging	Kab/Kota	13	13		13		13		13		13		13		
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1743722	1743722	3.487.035.620,00	1743722	1.846.555.375	1743722	1.853.400.000	1743722	1.889.269.408	1743722	1.909.705.068	1743722	1.932.074.970	
1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65308	65308	555.193.200,00	65308	665.968.875	65308	668.437.422	65308	681.373.892	65308	688.744.108	65308	696.811.920	
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1	154.557.000,00	1	318.107.400	1	319.286.529	1	325.465.777	1	328.986.242	1	332.839.920	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	708.964.000,00	1	313.436.000	1	314.597.813	1	320.686.319	1	324.155.088	1	327.952.175	
1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	251.082.800,00	1	251.082.500	1	252.013.188	1	256.890.474	1	259.669.182	1	262.710.895	
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	7	7	1.176.523.900,00	10	1.023.213.500	11	1.027.006.245	11	1.046.882.205	12	1.058.206.016	13	1.070.601.630	
1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	220	230	127.015.600,00	220	59.660.000	220	59.881.142	220	61.040.039	220	61.700.291	220	62.423.035	
1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1	1	4.993.750,00	1	106.496.600	1	106.891.351	1	108.960.051	1	110.138.640		111.428.782	
Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persen	96	96	103.115.873.867	96	113.515.652.137	100	113.936.420.605	100	116.141.466.335	100	117.397.733.732	100	118.772.907.309	
	Persentase FKTP terakreditasi Paripurna	Persen	44	45		46		47		48		49		50		
	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	41,3	85		90		92		94		95		96,5		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,49	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Persen	60	65%		70%		75%		80%		90%		100%		
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Angka	89	89		90		90		90		90		90		
	Persentase Pasien Keluar Sembuh/Mandiri	Persen	95	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
1.02.02.1.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					35.108.024.290		43.374.236.130		43.535.011.412		44.377.557.548		44.857.576.274		45.383.028.954	
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit	persen	100	100%	35.108.024.290	100%	43.374.236.130	100%	43.535.011.412	100%	44.377.557.548	100%	44.857.576.274	100%	45.383.028.954	
	Persentase Sarana Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Fasyankes dengan Alkes sesuai standar	Persen	84	86%		88%		90%		92%		94%		96%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Keberhasilan PTI Pengobatan karies gigi	Persentase	51	52		53		54		55		56		57		
	Jumlah fasyankes yang menyediakan konsultasi jarak jauh antar failitas Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan telemedisin	Unit	2	4		6		8		10		12		14		
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	374.018.300,00	1	166.102.200	1	166.717.891	1	169.944.432	1	171.782.670	1	173.794.900	
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	N/A	N/A	0	16	10.061.026.000	23	10.098.319.205	23	10.293.755.006	27	10.405.099.465	35	10.526.982.720	
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	49	50	32.369.907.590,00	1458	16.652.179.288	1442	16.713.903.922	1412	17.037.373.118	1409	17.221.661.272	1409	17.423.392.367	
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	0	1	912.151.300	1	915.532.371	1	933.250.944	1	943.345.640	1	954.395.800	
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	250	250	2.105.108.200,00	1740	4.571.417.662	1740	4.588.362.536	1740	4.677.162.493	1740	4.727.753.956	1740	4.783.133.920	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	2	4	258.990.200,00	6	258.969.750	8	259.929.673	10	264.960.170	12	267.826.165	14	270.963.430	
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	N/A	N/A	0	3	10.752.389.930	3	10.792.245.814	3	11.001.111.385	3	11.120.107.106	3	11.250.365.817	
1.02.02.1.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					64.216.299.977		64.098.588.757		64.336.182.995		65.581.300.447		66.290.673.699		67.067.189.393	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu dan Kriteria Lainnya yang Terpenuhi Layanan Kesehatan;	Persen	100	100	64.216.299.977	100	64.098.588.757	100	64.336.182.995	100	65.581.300.447	100	66.290.673.699	100	67.067.189.393	
	Persentase tempat tidur yang dimanfaatkan (BOR)	Persen	70	70		70		70		70		70		70		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)				(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
				Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan khusus	orang	1000	1000		1200		1300		1400		1500		1600		
				Jumlah Fasyankes lainnya yang melaksanakan RME dan terkoneksi dengan platfom SATUSEHAT	Jumlah	50	570		600		650		700		750		800		
				Persentase Klinik Pratama dan Praktik Mandiri dokter yang berjejaring dengan puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas (TBC, Hipertensi dan DM)	Persen	0	10		20		30		40		50		60		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan verifikasi kelayakan sesuai standar	Persen	60	65		70		75		80		90		100		
				Persentase Kabupaten/Kota dengan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SPM sesuai Ketentuan	Persen	100			100		100		100		100		100		
				Persentase Keaktifan Fasyankes Rumah Sakit dalam pemanfaatan SIRS Online	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Rumah Sakit yang Terkoneksi dengan Rekam Medik Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan satu sehat	Fasyankes	49	49		50		51		52		52		52		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	60.268.678.132,00	12	61.745.867.532	12	61.974.740.939	12	63.174.156.693	12	63.857.492.595	12	64.605.506.490	
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	3.138.393.050,00	1	1.781.325.500	1	1.787.928.339	1	1.822.530.653	1	1.842.244.420	1	1.863.824.104	
1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	1	246.158.825,00	1	63.686.625	1	63.922.692	1	65.159.807	1	65.864.621	1	66.636.146	
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	479.701.870,00	1	343.000.000	1	344.271.398	1	350.934.186	1	354.730.135	1	358.885.373	
1.02.02.1.02.0024 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	83.368.100,00	1	164.709.100	1	165.319.627	1	168.519.108	1	170.341.928	1	172.337.280	
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					1.298.529.000		1.420.921.475		1.426.188.405		1.453.789.857		1.469.515.065		1.486.728.671	
Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	1.298.529.000	100	1.420.921.475	100	1.426.188.405	100	1.453.789.857	100	1.469.515.065	100	1.486.728.671	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan pencatatan dan pelaporan dengan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi	Persen	80	75		80		85		90		95		100		
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1.298.529.000	1	1.420.921.475	1	1.426.188.405	1	1.453.789.857	1	1.469.515.065	1	1.486.728.671	
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					2.493.020.600		4.621.905.775		4.639.037.793		4.728.818.483		4.779.968.694		4.835.960.291	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Penguatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Unit	50	50	2.493.020.600	50	4.621.905.775	51	4.639.037.793	51	4.728.818.483	51	4.779.968.694	51	4.835.960.291	
	Jumlah Fasyankes Melaporkan Penyelenggaraan Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA)	Fasyankes	0	2		4		6		7		8		10		
	Jumlah Puskesmas dan Klinik yang Terakreditasi	Jumlah	364	402		412		422		432		442		452		
	Jumlah Puskesmas dan Klinik Melaporkan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) melalui DFO	Jumlah	33	50		80		120		170		250		300		
	Persentase Respon Time SISRUTE Rumah Sakit	Persen	11,67	12		14		15		16		18		20		
	Jumlah Laboratorium Kesehatan dan Unit Pengelola Darah Terakreditasi	Jumlah	6	6		7		8		9		10		12		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit diBanding Jumlah Penduduk	Perseribu	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
	Persentase Keaktifan Fasyankes Rumah Sakit dalam pemanfaatan SIRS Online	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Rasio Tempat Tidur 2:1000	Perseribu	2	2		2		2		2		2		2		
	Persentase Jenis Pemeriksaan yang Terakreditasi sesuai Standar Mutu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	6	6	113.518.800	6	201.552.600	6	202.299.695	6	206.214.862	6	208.445.426	6	210.887.114	
1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	48	50	802.806.800	23	944.112.300	26	947.611.841	29	965.951.257	32	976.399.662	40	987.837.012	
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	45	45	1.576.695.000	564	3.476.240.875	578	3.489.126.257	597	3.556.652.364	613	3.595.123.606	630	3.637.236.165	
Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standart	Persen	70,29	71%	25.231.765.187	75%	19.853.131.665	79%	19.926.721.268	83%	20.312.369.082	87%	20.532.081.885	90%	20.772.590.585	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional	Persen	40	40%		43%		46%		49%		52%		55%		
1.02.02.1.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.231.765.187		19.853.131.665		19.926.721.268		20.312.369.082		20.532.081.885		20.772.590.585	
Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	99.59 % dan 97.91 %	90%	25.231.765.187	91%	19.853.131.665	92%	19.926.721.268	94%	20.312.369.082	96%	20.532.081.885	98%	20.772.590.585	
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	80	90%		91%		92%		94%		96%		98%		
	Persentase saryanfar yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	-	55%		60%		65%		70%		75%		80%		
	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	40	45%		60%		65%		70%		75%		80%		
	Persentase sarana kefarmasian yang melakukan pengelolaan dan pelaporan narkotika dan psikotropika sesuai standar	persen	-	55%		60%		65%		70%		75%		80%		
	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat program tepat waktu dan tepat jumlah	persen	N/A	N/A		65%		70%		76%		83%		90%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan obat dan vaksin terhadap RKO dengan Vaksin	persen	N/A	68%		70%		74%		80%		90%		90%		
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	12	12	768.801.100,00	12	834.819.300	12	837.913.725	12	854.130.120	12	863.368.990	12	873.482.320	
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3	24.462.964.087,00	3	19.018.312.365	3	19.088.807.543	3	19.458.238.962	3	19.668.712.895	3	19.899.108.265	
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					**22.395.662.831**		**31.556.763.500**		**31.673.734.955**		**32.286.726.250**		**32.635.962.082**		**33.018.253.214**	
Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart	Persen	85	85,5	22.395.662.831	86,5	31.556.763.500	87,5	31.673.734.955	88,5	32.286.726.250	89,5	32.635.962.082	90,5	33.018.253.214	
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis sesuai standar Kompetensi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan					19.540.594.600		24.237.444.200		24.327.285.134		24.798.098.382		25.066.331.973		25.359.953.972	
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Puskemas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standart	Persen	90,5	90,5	19.540.594.600	91,5	24.237.444.200	92,5	24.327.285.134	93,5	24.798.098.382	94,5	25.066.331.973	95,5	25.359.953.972	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase RS dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standart	Persen	81	81		83		85		87		89		91		
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	219	434	3.477.009.200,00	404	8.172.860.000	545	8.203.154.340	545	8.361.912.447	545	8.452.360.745	545	8.551.370.000	
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	391	391	16.063.585.400,00	391	16.064.584.200	391	16.124.130.794	391	16.436.185.935	391	16.613.971.228	391	16.808.583.972	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar					2.855.068.231,00		7.319.319.300,00		7.346.449.821,00		7.488.627.868,00		7.569.630.109,00		7.658.299.242,00	
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikat dan kompetensi sesuai standar	Persen	100	100	2.855.068.231	100	7.319.319.300	100	7.346.449.821	100	7.488.627.868	100	7.569.630.109	100	7.658.299.242	
	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Kompetensi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	Kategori	A	A		A		A		A		A		A		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pelatihan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelatihan prioritas yang diidentifikasi dalam pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan unsur dan komponen akreditasi institusi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelatihan yang terakreditasi oleh Kementerian/Lembaga	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pasca Pelatihan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	2989	1510	1.281.170.731,00	5231	5.830.496.100	5273	5.852.108.000	5323	5.965.365.602	5388	6.029.891.172	5438	6.100.524.110	
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	2	1.573.897.500,00	1	1.488.823.200	1	1.494.341.821	1	1.523.262.266	1	1.539.738.937	1	1.557.775.132	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.03. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					**131.268.900**		**377.315.400**		**378.713.995**		**386.043.361**		**390.219.075**		**394.790.024**	
Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Persen	75	75	131.268.900	78	377.315.400	81	378.713.995	84	386.043.361	87	390.219.075	90	394.790.024	
1.02.04.1.01. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					113.747.900		320.017.400		321.203.608		327.419.959		330.961.561		334.838.379	
Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT	Persentase Sarana Distribusi Kefarmasian yang Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan OOT sesuai standar	Persen	N/A	85	113.747.900	88	320.017.400	91	321.203.608	93	327.419.959	95	330.961.561	98	334.838.379	
	Persentase Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan;	Persen	70	72		74		76		78		80		82		
	Persentase Sarana Distribusi Alkes dan PKRT yang Menindaklanjuti Hasil Temuan Tepat Waktu	Persen	75			75		75		75		75		75		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase PKRT yang memenuhi ketentuan perizinan sesuai standart	Persen	54	58		60		62		64		68		70		
	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian dan pengawasan PKRT sesuai ketentuan perizinan	Persen	-	-		-		30		35		40		45		
1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	39	48	113.747.900,00	50	320.017.400	51	321.203.608	52	327.419.959	53	330.961.561	54	334.838.379	
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					17.521.000		57.298.000		57.510.387		58.623.402		59.257.514		59.951.645	
Meningkatnya Kualitas Obat Tradisional	Persentase UKOT yang Dikendalikan dan Diawasi Dalam Rangka Perizinan Berusaha Sesuai Standar	Persen	50	50	17.521.000	52	57.298.000	56	57.510.387	60	58.623.402	65	59.257.514	70	59.951.645	
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	5		17.521.000,00	5	57.298.000	5	57.510.387	5	58.623.402	5	59.257.514	5	59.951.645	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					**3.050.414.700**		**1.914.125.100**		**1.921.220.188**		**1.958.402.138**		**1.979.585.587**		**2.002.774.056**	
Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	persen	20	30	3.050.414.700	40	1.914.125.100	50	1.921.220.188	60	1.958.402.138	70	1.979.585.587	80	2.002.774.056	
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					2.083.233.800		1.065.113.300		1.069.061.355		1.089.751.220		1.101.538.733		1.114.441.937	
Meningkatnya Efektivitas Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemitraan Lintas Sektor dalam Program Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan.	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	Persen	35	40	2.083.233.800	45	1.065.113.300	50	1.069.061.355	55	1.089.751.220	60	1.101.538.733	65	1.114.441.937	
	Persentase kader posyandu strata madya	Persen	1	1,5		1,7		1,9		2		2,1		2,5		
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Pangkalan Saka Bakti Husada	persen	40	41		42		43		44		45		46		
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	2.083.233.800	1	1.065.113.300	1	1.069.061.355	1	1.089.751.220	1	1.101.538.733	1	1.114.441.937	
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					723.023.500		688.726.100		691.279.002		704.657.531		712.279.600		720.623.101	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Upaya Promotif dan Preventif.	Cakupan Indikator PHBS	Persen	15	17	723.023.500	19	688.726.100	21	691.279.002	23	704.657.531	25	712.279.600	27	720.623.101	
1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	356.144.600	1	316.718.900	1	317.892.882	1	324.045.158	1	327.550.258	1	331.387.116	
1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	366.878.900	1	372.007.200	1	373.386.120	1	380.612.373	1	384.729.342	1	389.235.985	
1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					244.157.400		160.285.700		160.879.831		163.993.387		165.767.254		167.709.018	
Meningkatnya Kapasitas, Keterjangkauan, dan Keberlangsungan Layanan UKBM dalam Mendukung Pelayanan Promotif dan Preventif di Tingkat Masyarakat	Persentase UKBM Aktif	Persen	35	37	244.157.400	39	160.285.700	42	160.879.831	45	163.993.387	47	165.767.254	50	167.709.018	
1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	1	244.157.400	1	160.285.700	1	160.879.831	1	163.993.387	1	165.767.254	1	167.709.018	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,05	90,05		90,10		90,15		90,20		90,25		90,30		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Persentase	89,3	89.30		95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	0	2		2		2		2		2		2		
	Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Indeks	3	3		3,09		3,18		3,30		3,45		3,60		
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,56	4,58		4,6		4,61		4,63		4,65		4,67		
1.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					**851.402.621.447**		**1.366.672.378.832**		**1.371.729.362.899**		**1.398.285.884.696**		**1.413.410.723.626**		**1.429.967.134.160**	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	851.402.621.447	100	1.366.672.378.832	100	1.371.729.362.899	100	1.398.285.884.696	100	1.413.410.723.626	100	1.429.967.134.160	
	Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal;	Nilai	N/A	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti;	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD	Angka	89,3	95		95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD	Rp	N/A	766.576.526.059		729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	Angka	89,3	95		95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		
	Nilai Pendapatan Daerah UPT	Rp	N/A	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.457.606.750		2.445.683.425		2.454.748.840		2.502.256.330		2.529.322.487		2.558.950.464	
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu	Persen	100	100	1.457.606.750	100	2.445.683.425	100	2.454.748.840	100	2.502.256.330	100	2.529.322.487	100	2.558.950.464	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	825.905.775	3	1.401.091.325	3	1.406.284.750	3	1.433.501.000	3	1.449.006.751	3	1.465.980.126	
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	8.633.000	3	17.817.400	3	17.883.444	3	18.229.547	3	18.426.730	3	18.642.580	
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	295.923.300	12	264.763.000	12	265.744.397	12	270.887.428	12	273.817.536	12	277.024.980	
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	180.823.600	6	338.440.425	6	339.694.922	6	346.269.140	6	350.014.630	6	354.114.630	
1.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	43	106.418.400	52	168.675.525	52	169.300.755	52	172.577.283	52	174.444.000	52	176.487.400	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	N/A	N/A	0	1	115.919.200	1	116.348.878	1	118.600.612	1	119.883.480	1	121.287.770	
1.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	39.902.675	1	138.976.550	1	139.491.694	1	142.191.320	1	143.729.360	1	145.412.978	
1.02.01.1.02. - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.018.793.970		596.069.294.726		598.278.744.781		609.857.412.812		616.454.057.489		623.675.077.028	
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	49.018.793.970	100	596.069.294.726	100	598.278.744.781	100	609.857.412.812	100	616.454.057.489	100	623.675.077.028	
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	390	390	47.021.888.970	4240	593.475.410.626	4398	595.675.245.931	4566	607.203.527.668	4688	613.771.466.065	4858	620.961.062.265	
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	1.595.342.000	12	1.961.080.000	12	1.968.349.135	12	2.006.443.186	12	2.028.146.280	12	2.051.903.580	
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	-	-	1	31.296.000	1	31.412.005	1	32.019.930	1	32.366.280	1	32.745.413	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.188.700	1	261.903.100	1	262.873.896	1	267.961.375	1	270.859.830	1	274.032.630	
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	84.752.600	1	7.670.000	1	7.698.430	1	7.847.420	1	7.932.304	1	8.025.220	
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	12	93.714.900	12	189.751.600	12	190.454.952	12	194.140.884	12	196.240.840	12	198.539.570	
1.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	215.906.800	12	142.183.400	12	142.710.432	12	145.472.349	12	147.045.890	12	148.768.350	
1.02.01.1.03. - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					142.122.525		305.780.625		306.914.062		312.853.862		316.237.908		319.942.256	
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	142.122.525	100	305.780.625	100	306.914.062	100	312.853.862	100	316.237.908	100	319.942.256	
1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	13.729.500	2	28.304.000	2	28.408.914	2	28.958.720	2	29.271.958	2	29.614.844	
1.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	-	1	39.375.000	1	39.520.951	1	40.285.812	1	40.721.572	1	41.198.576	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	1	74.910.000	1	75.187.669	1	76.642.800	1	77.471.820	1	78.379.310	
1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	57.806.400	4	92.719.000	4	93.062.682	4	94.863.750	4	95.889.865	4	97.013.099	
1.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	70.586.625	1	70.472.625	1	70.733.846	1	72.102.780	1	72.882.693	1	73.736.427	
1.02.01.1.05. - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.908.160.750		4.670.650.000		4.687.962.698		4.778.690.248		4.830.379.906		4.886.962.010	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.908.160.750	100	4.670.650.000	100	4.687.962.698	100	4.778.690.248	100	4.830.379.906	100	4.886.962.010	
1.02.01.1.05.0001. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	12	67.475.000	2	62.475.000	3	62.706.576	3	63.920.155	3	64.611.560	3	65.368.407	
1.02.01.1.05.0002. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	534.200.000	4	459.750.000	4	461.454.155	4	470.384.816	4	475.472.827	4	481.042.420	
1.02.01.1.05.0003. - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	106.359.000	1	120.756.000	1	121.203.606	1	123.549.296	1	124.885.692	1	126.348.578	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.05.0004. - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	109.894.000	1	84.144.000	1	84.455.897	1	86.090.397	1	87.021.610	1	88.040.965	
1.02.01.1.05.0005. - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	184.425.750	12	176.446.000	12	177.100.032	12	180.527.502	12	182.480.215	12	184.617.750	
1.02.01.1.05.0009. - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	181	130	1.266.162.000	254	3.007.349.000	286	3.018.496.341	323	3.076.914.205	337	3.110.196.264	348	3.146.628.480	
1.02.01.1.05.0010. - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	50	639.645.000	1375	459.300.000	1500	461.002.487	1550	469.924.407	1600	475.007.438	1650	480.571.580	
1.02.01.1.05.0011. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	0	-	750	300.430.000	750	301.543.604	750	307.379.470	750	310.704.300	750	314.343.830	
1.02.01.1.06. - Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.268.829.822		4.843.823.891		4.922.918.053		5.025.869.951		5.079.476.109		5.138.156.110	
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	4.268.829.822	100	4.843.823.891	100	4.922.918.053	100	5.025.869.951	100	5.079.476.109	100	5.138.156.110	
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	143.439.832	4	195.693.412	4	196.418.789	4	200.220.140	4	202.385.862	4	204.756.569	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	716.139.468	4	898.188.204	4	901.517.518	4	918.964.857	4	928.905.025	4	939.786.032	
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	1.412.489.554	4	472.579.850	4	474.331.562	4	483.511.443	4	488.741.440	4	494.466.460	
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	499.315.000	4	460.265.000	4	461.971.064	4	470.911.729	4	476.005.440	4	481.581.272	
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	288.064.968	4	249.244.550	4	250.168.425	4	255.010.000	4	257.768.376	4	260.787.823	
1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	28.200.000	12	29.700.000	12	29.810.089	12	30.387.020	12	30.715.700	12	31.075.497	
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	47.650.000	12	53.475.000	12	53.673.215	12	54.711.970	12	55.303.773	12	55.951.590	
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.056.913.000	12	2.390.384.875	12	2.390.384.875	12	2.445.678.630	12	2.472.132.800	12	2.501.090.870	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	67.868.000	1	68.179.000	1	68.431.719	1	69.756.100	1	70.510.630	1	71.336.577	
1.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	8.750.000	1	26.114.000	1	96.210.797	1	96.718.062	1	97.007.063	1	97.323.420	
1.02.01.1.07. - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.434.597.870		5.131.082.290		7.723.101.673		9.449.773.135		10.016.558.357		10.178.718.320	
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6.434.597.870	100	5.131.082.290	100	7.723.101.673	100	9.449.773.135	100	10.016.558.357	100	10.178.718.320	
1.02.01.1.07.0002. - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	800.286.200	3	2.171.544.000	4	2.172.593.262	3	2.591.775.585	3	2.525.807.865	3	2.702.114.808	
1.02.01.1.07.0005. - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	4	972.833.100	4	1.612.497.000	4	1.680.000.000	4	1.979.796.856	4	2.667.642.215	4	2.687.176.640	
1.02.01.1.07.0006. - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	201	1.826.099.570	210	1.147.098.790	210	1.651.350.741	212	2.073.633.177	220	2.186.328.015	225	2.200.224.425	
1.02.01.1.07.0009. - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A					1	468.474.043	1	600.000.000	1	500.000.000,00	1	450.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.07.0010. - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	13	2.835.379.000	7	50.900.000	100	1.101.088.671	120	1.552.077.405	120	1.482.640.710	120	1.483.257.335	
1.02.01.1.07.0011.- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	0	-	35	149.042.500	35	649.594.956	35	652.490.112	35	654.139.552	35	655.945.112	
1.02.01.1.08. - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.436.029.952		15.693.193.623		15.731.363.584		16.056.204.449		16.229.879.595		16.419.993.159	
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	14.436.029.952	100	15.693.193.623	100	15.731.363.584	100	16.056.204.449	100	16.229.879.595	100	16.419.993.159	
1.02.01.1.08.0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	70.539.000	12	23.295.000	12	23.381.348	12	23.833.854	12	24.091.657	12	24.373.862	
1.02.01.1.08.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	4.172.781.932	12	6.158.434.303	12	6.181.261.771	12	6.300.889.585	12	6.369.044.417	12	6.443.650.130	
1.02.01.1.08.0004. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	10.192.709.020	12	9.511.464.320	12	9.526.720.465	12	9.731.481.010	12	9.836.743.521	12	9.951.969.167	
1.02.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah					6.159.953.749		7.840.640.950		7.949.703.854		8.252.008.593		8.328.780.254		8.423.764.884	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik	Persen	100	100	6.159.953.749	100	7.840.640.950	100	7.949.703.854	100	8.252.008.593	100	8.328.780.254	100	8.423.764.884	
1.02.01.1.09.0001. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	269.070.000	7	245.270.000	7	246.179.142	8	250.943.520	8	253.657.900	8	256.629.200	
1.02.01.1.09.0002. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	55	2.141.474.000	60	2.319.260.000	61	2.320.856.800	61	2.372.908.512	61	2.398.575.550	63	2.426.671.985	
1.02.01.1.09.0005. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	43	29.750.000	30	23.750.000	31	23.838.035	32	24.299.379	35	24.562.220	40	24.849.935	
1.02.01.1.09.0006. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	353	1.220.081.523	383	579.624.000	389	581.772.492	394	593.031.710	399	599.446.354	404	606.468.150	
1.02.01.1.09.0009.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6	1.615.498.226	6	3.547.486.950	6	3.547.636.420	6	3.629.546.485	6	3.668.806.200	6	3.711.781.864	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
1.02.01.1.09.0010. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	442.040.000	135	1.125.250.000	140	1.129.420.965	145	1.131.278.987	145	1.133.732.030	150	1.147.363.750	
1.02.01.1.09.0011. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		4	442.040.000	0	-	10	100.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	
1.02.01.1.10. Peningkatan Pelayanan BLUD					766.576.526.059		729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase capaian target pendapatan (UPT/BLUD/BLUD RS)	Persen	100	100	766.576.526.059	100	729.672.229.302	100	729.673.905.354	100	742.050.815.316	100	749.626.031.521	100	758.365.569.929	
1.02.01.1.10.0001. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	2	6	766.576.526.059	6	729.672.229.302	6	729.673.905.354	6	742.050.815.316	6	749.626.031.521	6	758.365.569.929	

4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun maka ditetapkan Program Prioritas beserta kegiatan pendukungnya sebagaimana pada tabel 4.4 sebagai berikut,

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	- Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Daya Manusia Kesehatan		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 -2029 seperti tercantum pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persen	12	11,20	10,5	9,80	9,20	8,60	8,02	
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	146	189	172	154	137	119	102	
3	Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	Angka	11,6	11,3	11,2	10,8	10,5	10,3	10	
4	Angka Kesakitan	Angka	5,405	5,4	5,3	5.00	4,95	4,9	4,8	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,05	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
6	Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	89,3	89.30	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
7	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Angka	0	2	2	2	2	2	2	
8	Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3	3,09	3,18	3,30	3,45	3,60	
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67	

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah adalah Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Perangkat Daerah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan telah menetapkan target IKK untuk periode Renstra Tahun 2025 – 2029 seperti tercantum pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000 Penduduk	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

RENSTRA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029

BAB V

PENUTUP

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kalimantan Selatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 ini memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan berikut Indikator Kinerja yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan serta kebijakan nasional di bidang kesehatan dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di bidang kesehatan.

Melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dokumen ini akan menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) RSD. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat dan tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan komitmen bersama, Renstra ini diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju Kalimantan Selatan Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan yang bekerja mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Bahan yang digunakan dalam penyusunan Renstra yaitu RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan RI;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja/bidang , UPT dan UOBK RSD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam Perencanaan Penganggaran;
3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026, 2027,2028 dan 2029;
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, UPT, UOBK RSD didalamnya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh Lintas Sektor/SKPD/OPD terkait (*crosscutting*), Instansi Vertikal Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI), Masyarakat dan Dunia Usaha;
5. Kepala Dinas menjalankan tugas organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan aparatur yang ada;
6. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Direktur UOBK Rumah Sakit Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029;

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

7. Kepala Sub.Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, UPT dan UOBK RSD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta anggaran dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memprioritaskan kegiatan utama yang merupakan tujuan bersama;
8. Menyusun Pakta Integritas antar Program/Bidang/UPT/UOBK RSD dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program;
9. Evaluasi Tahunan terhadap pelaksanaan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dilakukan akhir tahun terhadap indikator kinerja/program berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten/Kota dan internal program untuk mengukur keberhasilan perwujudan Visi dan Misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (masyarakat dan pemerintah);
10. Evaluasi Kinerja tersebut sebagai pedoman, bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya akan diperiksa, dievaluasi dan dinilai oleh Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN											
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,18	74,42	74,66	74,91	75,15	75,39	75,64	
			Prevalensi Stunting (%)	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita (%)	12	11,2	10,5	9,8	9,2	8,6	8,02	
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Angka)	146	189	172	154	137	119	102	
			Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) (Angka)	11,6	11,3	11,2	10,8	10,5	10,3	10	
			Angka Kesakitan (Angka)	5,405	5,4	5,3	5	4,95	4,9	4,8	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	90,05	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25	90,3	
			Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	89,3	89,3	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
			Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)	0	2	2	2	2	2	2	
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)	3	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.548.717.749.116		1.554.449.520.757		1.584.542.280.585		1.601.681.799.072		1.620.443.579.330	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.366.672.378.832		1.371.729.362.899		1.398.285.884.696		1.413.410.723.626		1.429.967.134.160	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	100	1.366.672.378.832	100	1.371.729.362.899	100	1.398.285.884.696	100	1.413.410.723.626	100	1.429.967.134.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	-	766.576.526.059	729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	89,3	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	89,3	95	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	-	300.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					148.197.166.284		148.746.488.720		151.625.224.140		153.265.308.702		155.060.627.876	
Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	81,78	85	88	8.100.856.700	91	8.130.884.144	93	8.288.243.584	95	8.377.895.030	95	8.476.032.014	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	75,2	88	88,68		89,36		90,04		90,72		91,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV (%)	62	74	80		87		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/Kota)	0	0	3		4		5		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (Kabupaten/Kota)	7	8	9		10		11		12		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kabupaten/kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	11	12	12		12		13		13		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kabupaten/kota yg Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas (Kabupaten/Kota)	5	6	7		8		9		10		11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita (%)	21,5	20,1	18,8	6.727.525.782	17,6	6.752.462.703	16,4	6.883.145.139	15,4	6.957.598.055	14,37	7.039.097.968	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	71,75	88	89		90		91		92		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH) (Angka)	9,6	9,2	8,4		8		7,8		7,2		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) (Angka)	11,2	10,9	10,4		9,9		9,4		8,9		8,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia (Kabupaten/Kota)	5	5	7		9		11		13		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standart; (%)	70,29	71	75	19.853.131.665	79	19.926.721.268	83	20.312.369.082	87	20.532.081.885	90	20.772.590.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional (%)	40	40	43		46		49		52		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi; (%)	96	96	96	113.515.652.137	100	113.936.420.605	100	116.141.466.335	100	117.397.733.732	100	118.772.907.309	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase FKTP terakreditasi Paripurna (%)	44	45	46		47		48		49		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	41,3	85	90		92		94		95		96,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan (Per 1000 Penduduk)	1,49	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (%)	60	65	70		75		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai akreditasi Rumah Sakit (Angka)	89	89	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pasien keluar sembuh/mandiri (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					31.556.763.500		31.673.734.955		32.286.726.250		32.635.962.082		33.018.253.214	
Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	-	100	100	31.556.763.500	100	31.673.734.955	100	32.286.726.250	100	32.635.962.082	100	33.018.253.214	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart (%)	85	85,5	86,5		87,5		88,5		89,5		90,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					377.315.400		378.713.995		386.043.361		390.219.075		394.790.024	
Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar (%)	75	75	78	377.315.400	81	378.713.995	84	386.043.361	87	390.219.075	90	394.790.024	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.914.125.100		1.921.220.188		1.958.402.138		1.979.585.587		2.002.774.056	
Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) (%)	20	30	40	1.914.125.100	50	1.921.220.188	60	1.958.402.138	70	1.979.585.587	80	2.002.774.056	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					1548717749116.00		1554449520757.00		1584542280585.00		1601681799072.00		1620443579330.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN							
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Prevalensi Stunting (%)		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan			Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita (%)		
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Angka)		
					Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) (Angka)		
					Angka Kesakitan (Angka)		
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba		Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standart; (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi; (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar		Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase FKTP terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba		Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar		Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH) (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar		Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/Kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (Kabupaten/Kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Nilai akreditasi Rumah Sakit (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pasien keluar sembuh/mandiri (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar		Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia (Kabupaten/Kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)		Kabupaten/kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Kabupaten/kota yg Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas (Kabupaten/Kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil melalui Layanan Kesehatan Bergerak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil melalui Layanan Kesehatan Bergerak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
			Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak serta Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak serta Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0024 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Pelayanan Imunisasi yang Merata dan Berkelanjutan pada Seluruh Tingkat Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Pelayanan Imunisasi yang Merata dan Berkelanjutan pada Seluruh Tingkat Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Layanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Layanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
			Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.1.02.0030 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Penguatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis sesuai Standar Kompetensi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan		Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
					Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
				Meningkatnya Kualitas Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
					Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	
			Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan		Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Efektivitas Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemitraan Lintas Sektor dalam Program Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan.	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Upaya Promotif dan Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Meningkatnya Kapasitas, Keterjangkauan, dan Keberlangsungan Layanan UKBM dalam Mendukung Pelayanan Promotif dan Preventif di Tingkat Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1.02.05.1.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)		
					Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD		Persentase kegiatan tepat waktu (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai pendapatan UPT (Rp)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.02.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,18	74,42	74,66	74,91	75,15	75,39	75,64	
2	Prevalensi Stunting	%	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	146	189	172	154	137	119	102	
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67	
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	75,2	88	88,68	89,36	90,04	90,72	91,4	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	Per 1000 Penduduk	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terkareditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.548.717.749.116		1.554.449.520.757		1.584.542.280.585		1.601.681.799.072		1.620.443.579.330		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.366.672.378.832		1.371.729.362.899		1.398.285.884.696		1.413.410.723.626		1.429.967.134.160		
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100	1.366.672.378.832	100	1.371.729.362.899	100	1.398.285.884.696	100	1.413.410.723.626	100	1.429.967.134.160	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100		100		100		100		100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	89,3	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5			
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100		100		100		100		100			
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	-	729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	89,3	95,1		95,2		95,3		95,4		95,5			
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	-	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100		100		100		100		100			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.445.683.425		2.454.748.840		2.502.256.330		2.529.322.487		2.558.950.464		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	6	2.445.683.425	6	2.454.748.840	6	2.502.256.330	6	2.529.322.487	6	2.558.950.464		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	52		52		52		52		52			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.401.091.325		1.406.284.750		1.433.501.000		1.449.006.751		1.465.980.126		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.401.091.325	3	1.406.284.750	3	1.433.501.000	3	1.449.006.751	3	1.465.980.126		
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				17.817.400		17.883.444		18.229.547		18.426.730		18.642.580		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	17.817.400	3	17.883.444	3	18.229.547	3	18.426.730	3	18.642.580		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				264.763.000		265.744.397		270.887.428		273.817.536		277.024.980		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	264.763.000	12	265.744.397	12	270.887.428	12	273.817.536	12	277.024.980		
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				338.440.425		339.694.922		346.269.140		350.014.630		354.114.630		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	6	338.440.425	6	339.694.922	6	346.269.140	6	350.014.630	6	354.114.630		
1.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				168.675.525		169.300.755		172.577.283		174.444.000		176.487.400		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	52	168.675.525	52	169.300.755	52	172.577.283	52	174.444.000	52	176.487.400		
1.02.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				115.919.200		116.348.878		118.600.612		119.883.480		121.287.770		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	115.919.200	1	116.348.878	1	118.600.612	1	119.883.480	1	121.287.770		
1.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				138.976.550		139.491.694		142.191.320		143.729.360		145.412.978		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	138.976.550	1	139.491.694	1	142.191.320	1	143.729.360	1	145.412.978		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				596.069.294.726		598.278.744.781		609.857.412.812		616.454.057.489		623.675.077.028		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	596.069.294.726	1	598.278.744.781	1	609.857.412.812	1	616.454.057.489	1	623.675.077.028		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	390	4.240		4.398		4.566		4.688		4.858			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				593.475.410.626		595.675.245.931		607.203.527.668		613.771.466.065		620.961.062.265		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	390	4.240	593.475.410.626	4.398	595.675.245.931	4.566	607.203.527.668	4.688	613.771.466.065	4.858	620.961.062.265		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.961.080.000		1.968.349.135		2.006.443.186		2.028.146.280		2.051.903.580		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	1.961.080.000	12	1.968.349.135	12	2.006.443.186	12	2.028.146.280	12	2.051.903.580		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				31.296.000		31.412.005		32.019.930		32.366.280		32.745.413		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	31.296.000	1	31.412.005	1	32.019.930	1	32.366.280	1	32.745.413		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				261.903.100		262.873.896		267.961.375		270.859.830		274.032.630		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	261.903.100	1	262.873.896	1	267.961.375	1	270.859.830	1	274.032.630		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7.670.000		7.698.430		7.847.420		7.932.304		8.025.220		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	7.670.000	1	7.698.430	1	7.847.420	1	7.932.304	1	8.025.220		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				189.751.600		190.454.952		194.140.884		196.240.840		198.539.570		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	189.751.600	12	190.454.952	12	194.140.884	12	196.240.840	12	198.539.570		
1.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				142.183.400		142.710.432		145.472.349		147.045.890		148.768.350		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	142.183.400	12	142.710.432	12	145.472.349	12	147.045.890	12	148.768.350		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				305.780.625		306.914.062		312.853.862		316.237.908		319.942.256		
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	305.780.625	2	306.914.062	2	312.853.862	2	316.237.908	2	319.942.256		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4		4		4		4		4			
1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				28.304.000		28.408.914		28.958.720		29.271.958		29.614.844		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	28.304.000	2	28.408.914	2	28.958.720	2	29.271.958	2	29.614.844		
1.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				39.375.000		39.520.951		40.285.812		40.721.572		41.198.576		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	39.375.000	1	39.520.951	1	40.285.812	1	40.721.572	1	41.198.576		
1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				74.910.000		75.187.669		76.642.800		77.471.820		78.379.310		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	74.910.000	1	75.187.669	1	76.642.800	1	77.471.820	1	78.379.310		
1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				92.719.000		93.062.682		94.863.750		95.889.865		97.013.099		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4	92.719.000	4	93.062.682	4	94.863.750	4	95.889.865	4	97.013.099		
1.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				70.472.625		70.733.846		72.102.780		72.882.693		73.736.427		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	70.472.625	1	70.733.846	1	72.102.780	1	72.882.693	1	73.736.427		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.670.650.000		4.687.962.698		4.778.690.248		4.830.379.906		4.886.962.010		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	4.670.650.000	1	4.687.962.698	1	4.778.690.248	1	4.830.379.906	1	4.886.962.010		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	12	2		3		3		3		3			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	181	254		286		323		337		348			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	1.375		1.500		1.550		1.600		1.650			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	750		750		750		750		750			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
1.02.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				62.475.000		62.706.576		63.920.155		64.611.560		65.368.407		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	12	2	62.475.000	3	62.706.576	3	63.920.155	3	64.611.560	3	65.368.407		
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				459.750.000		461.454.155		470.384.816		475.472.827		481.042.420		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	459.750.000	4	461.454.155	4	470.384.816	4	475.472.827	4	481.042.420		
1.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				120.756.000		121.203.606		123.549.296		124.885.692		126.348.578		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	120.756.000	1	121.203.606	1	123.549.296	1	124.885.692	1	126.348.578		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				84.144.000		84.455.897		86.090.397		87.021.610		88.040.965		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	84.144.000	1	84.455.897	1	86.090.397	1	87.021.610	1	88.040.965		
1.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				176.446.000		177.100.032		180.527.502		182.480.215		184.617.750		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	4	176.446.000	4	177.100.032	4	180.527.502	4	182.480.215	4	184.617.750		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3.007.349.000		3.018.496.341		3.076.914.205		3.110.196.264		3.146.628.480		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	181	254	3.007.349.000	286	3.018.496.341	323	3.076.914.205	337	3.110.196.264	348	3.146.628.480		
1.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				459.300.000		461.002.487		469.924.407		475.007.438		480.571.580		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	1.375	459.300.000	1.500	461.002.487	1.550	469.924.407	1.600	475.007.438	1.650	480.571.580		
1.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.430.000		301.543.604		307.379.470		310.704.300		314.343.830		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	750	300.430.000	750	301.543.604	750	307.379.470	750	310.704.300	750	314.343.830		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.843.823.891		4.922.918.053		5.025.869.951		5.079.476.109		5.138.156.110		
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	4.843.823.891	12	4.922.918.053	12	5.025.869.951	12	5.079.476.109	12	5.138.156.110		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				195.693.412		196.418.789		200.220.140		202.385.862		204.756.569		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	195.693.412	4	196.418.789	4	200.220.140	4	202.385.862	4	204.756.569		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				898.188.204		901.517.518		918.964.857		928.905.025		939.786.032		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	898.188.204	4	901.517.518	4	918.964.857	4	928.905.025	4	939.786.032		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				472.579.850		474.331.562		483.511.443		488.741.440		494.466.460		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4	472.579.850	4	474.331.562	4	483.511.443	4	488.741.440	4	494.466.460		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				460.265.000		461.971.064		470.911.729		476.005.440		481.581.272		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	460.265.000	4	461.971.064	4	470.911.729	4	476.005.440	4	481.581.272		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				249.244.550		250.168.425		255.010.000		257.768.376		260.787.823		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	4	249.244.550	4	250.168.425	4	255.010.000	4	257.768.376	4	260.787.823		
1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				29.700.000		29.810.089		30.387.020		30.715.700		31.075.497		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	29.700.000	12	29.810.089	12	30.387.020	12	30.715.700	12	31.075.497		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.475.000		53.673.215		54.711.970		55.303.773		55.951.590		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	53.475.000	12	53.673.215	12	54.711.970	12	55.303.773	12	55.951.590		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.390.384.875		2.390.384.875		2.445.678.630		2.472.132.800		2.501.090.870		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.390.384.875	12	2.390.384.875	12	2.445.678.630	12	2.472.132.800	12	2.501.090.870		
1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				68.179.000		68.431.719		69.756.100		70.510.630		71.336.577		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	68.179.000	1	68.431.719	1	69.756.100	1	70.510.630	1	71.336.577		
1.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				26.114.000		96.210.797		96.718.062		97.007.063		97.323.420		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	26.114.000	1	96.210.797	1	96.718.062	1	97.007.063	1	97.323.420		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.131.082.290		7.723.101.673		9.449.773.135		10.016.558.357		10.178.718.320		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	35	5.131.082.290	35	7.723.101.673	35	9.449.773.135	35	10.016.558.357	35	10.178.718.320		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	210		210		212		220		225			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	7		100		120		120		120			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	6		4		3		3		3			
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.171.544.000		2.172.593.262		2.591.775.585		2.525.807.865		2.702.114.808		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	6	2.171.544.000	4	2.172.593.262	3	2.591.775.585	3	2.525.807.865	3	2.702.114.808		
1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.612.497.000		1.680.000.000		1.979.796.856		2.667.642.215		2.687.176.640		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	4	1.612.497.000	4	1.680.000.000	4	1.979.796.856	4	2.667.642.215	4	2.687.176.640		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.147.098.790		1.651.350.741		2.073.633.177		2.186.328.015		2.200.224.425		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	210	1.147.098.790	210	1.651.350.741	212	2.073.633.177	220	2.186.328.015	225	2.200.224.425		
1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		468.474.043		600.000.000		500.000.000		450.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	468.474.043	1	600.000.000	1	500.000.000	1	450.000.000		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.900.000		1.101.088.671		1.552.077.405		1.482.640.710		1.483.257.335		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	7	50.900.000	100	1.101.088.671	120	1.552.077.405	120	1.482.640.710	120	1.483.257.335		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				149.042.500		649.594.956		652.490.112		654.139.552		655.945.112		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	35	149.042.500	35	649.594.956	35	652.490.112	35	654.139.552	35	655.945.112		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.693.193.623		15.731.363.584		16.056.204.449		16.229.879.595		16.419.993.159		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.693.193.623	12	15.731.363.584	12	16.056.204.449	12	16.229.879.595	12	16.419.993.159		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				23.295.000		23.381.348		23.833.854		24.091.657		24.373.862		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	23.295.000	12	23.381.348	12	23.833.854	12	24.091.657	12	24.373.862		
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.158.434.303		6.181.261.771		6.300.889.585		6.369.044.417		6.443.650.130		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.158.434.303	12	6.181.261.771	12	6.300.889.585	12	6.369.044.417	12	6.443.650.130		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.511.464.320		9.526.720.465		9.731.481.010		9.836.743.521		9.951.969.167		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.511.464.320	12	9.526.720.465	12	9.731.481.010	12	9.836.743.521	12	9.951.969.167		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.840.640.950		7.949.703.854		8.252.008.593		8.328.780.254		8.423.764.884		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	6	7.840.640.950	6	7.949.703.854	6	8.252.008.593	6	8.328.780.254	6	8.423.764.884		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	60		61		61		61		63			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	7		7		8		8		8			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	30		31		32		35		40			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180	383		389		394		399		404			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	135		140		145		145		150			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		10		25		25		150			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				245.270.000		246.179.142		250.943.520		253.657.900		256.629.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	7	245.270.000	7	246.179.142	8	250.943.520	8	253.657.900	8	256.629.200		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.319.260.000		2.320.856.800		2.372.908.512		2.398.575.550		2.426.671.985		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	60	2.319.260.000	61	2.320.856.800	61	2.372.908.512	61	2.398.575.550	63	2.426.671.985		
1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				23.750.000		23.838.035		24.299.379		24.562.220		24.849.935		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	30	23.750.000	31	23.838.035	32	24.299.379	35	24.562.220	40	24.849.935		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				579.624.000		581.772.492		593.031.710		599.446.354		606.468.150		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180	383	579.624.000	389	581.772.492	394	593.031.710	399	599.446.354	404	606.468.150		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.547.486.950		3.547.636.420		3.629.546.485		3.668.806.200		3.711.781.864		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	6	3.547.486.950	6	3.547.636.420	6	3.629.546.485	6	3.668.806.200	6	3.711.781.864		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.125.250.000		1.129.420.965		1.131.278.987		1.133.732.030		1.147.363.750		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	135	1.125.250.000	140	1.129.420.965	145	1.131.278.987	145	1.133.732.030	150	1.147.363.750		
1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	10	100.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	150	250.000.000		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929		
Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2	6	729.672.229.302	6	729.673.905.354	6	742.050.815.316	6	749.626.031.521	6	758.365.569.929		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				729.672.229.302		729.673.905.354		742.050.815.316		749.626.031.521		758.365.569.929		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2	6	729.672.229.302	6	729.673.905.354	6	742.050.815.316	6	749.626.031.521	6	758.365.569.929		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				148.197.166.284		148.746.488.720		151.625.224.140		153.265.308.702		155.060.627.876		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kabupaten/kota Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)	11	12	8.100.856.700	12	8.130.884.144	13	8.288.243.584	13	8.377.895.030	13	8.476.032.014	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	81,78	88		91		93		95		95			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	75,2	88,68		89,36		90,04		90,72		91,4			
	Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV (%)	62	80		87		94		95		95			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100		100		100		100		100			
	Kabupaten/kota yg Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas (Kabupaten/Kota)	5	7		8		9		10		11			
	Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (Kabupaten/Kota)	7	9		10		11		12		13			
	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/Kota)	0	3		4		5		7		8			
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				78.646.795.007		78.938.315.081		80.466.031.975		81.336.408.904		82.289.167.330		
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Pelayanan Imunisasi yang Merata dan Berkelanjutan pada Seluruh Tingkat Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	449.999.000	1	451.667.011	1	460.408.258	1	465.388.357	1	470.839.822		
1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				449.999.000		451.667.011		460.408.258		465.388.357		470.839.822		
Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	449.999.000	1	451.667.011	1	460.408.258	1	465.388.357	1	470.839.822		
Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	3.066.337.450	1	3.077.703.443	1	3.137.267.161	1	3.171.202.038	1	3.208.348.865		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				663.245.800		665.704.253		678.587.827		685.927.908		693.962.730		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	663.245.800	1	665.704.253	1	678.587.827	1	685.927.908	1	693.962.730		
1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.403.091.650		2.411.999.190		2.458.679.334		2.485.274.130		2.514.386.135		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	2	2.403.091.650	2	2.411.999.190	2	2.458.679.334	2	2.485.274.130	2	2.514.386.135		
Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif dan Layanan Kesehatan yang Tanggap dalam Penanganan KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	4.584.520.250	1	4.601.513.690	1	4.690.568.165	1	4.741.304.635	1	4.796.843.327		
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.743.722	1.743.722		1.743.722		1.743.722		1.743.722		1.743.722			
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.743.722	1.743.722		1.743.722		1.743.722		1.743.722		1.743.722			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	7	10		11		11		12		13			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	220	220		220		220		220		220			
1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				1.846.555.375		1.853.400.000		1.889.269.408		1.909.705.068		1.932.074.970		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.743.722	1.743.722	1.846.555.375	1.743.722	1.853.400.000	1.743.722	1.889.269.408	1.743.722	1.909.705.068	1.743.722	1.932.074.970		
1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				665.968.875		668.437.422		681.373.892		688.744.108		696.811.920		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.743.722	1.743.722	665.968.875	1.743.722	668.437.422	1.743.722	681.373.892	1.743.722	688.744.108	1.743.722	696.811.920		
1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				318.107.400		319.286.529		325.465.777		328.986.242		332.839.920		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	318.107.400	1	319.286.529	1	325.465.777	1	328.986.242	1	332.839.920		
1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				313.436.000		314.597.813		320.686.319		324.155.088		327.952.175		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	313.436.000	1	314.597.813	1	320.686.319	1	324.155.088	1	327.952.175		
1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				251.082.500		252.013.188		256.890.474		259.669.182		262.710.895		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	251.082.500	1	252.013.188	1	256.890.474	1	259.669.182	1	262.710.895		
1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1.023.213.500		1.027.006.245		1.046.882.205		1.058.206.016		1.070.601.630		
Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	7	10	1.023.213.500	11	1.027.006.245	11	1.046.882.205	12	1.058.206.016	13	1.070.601.630		
1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				59.660.000		59.881.142		61.040.039		61.700.291		62.423.035		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	220	220	59.660.000	220	59.881.142	220	61.040.039	220	61.700.291	220	62.423.035		
1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				106.496.600		106.891.351		108.960.051		110.138.640		111.428.782		
Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	106.496.600	1	106.891.351	1	108.960.051	1	110.138.640	1	111.428.782		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	71,75	89	6.727.525.782	90	6.752.462.703	91	6.883.145.139	92	6.957.598.055	93	7.039.097.968		
	Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita (%)	21,5	18,8		17,6		16,4		15,4		14,37			
	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) (Angka)	11,2	10,4		9,9		9,4		8,9		8,4			
	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH) (Angka)	9,6	8,4		8		7,8		7,2		7			
	Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia (Kabupaten/Kota)	5	7		9		11		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				63.507.544.027		63.742.947.441		64.976.583.825		65.679.416.039		66.448.771.584		
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil melalui Layanan Kesehatan Bergerak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	2	3	280.176.232	3	281.214.761	3	286.657.195	3	289.757.880	3	293.152.045		
1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)				280.176.232		281.214.761		286.657.195		289.757.880		293.152.045		
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	2	3	280.176.232	3	281.214.761	3	286.657.195	3	289.757.880	3	293.152.045		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				78.646.795.007		78.938.315.081		80.466.031.975		81.336.408.904		82.289.167.330		
Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak serta Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	2.801.243.700	1	2.811.627.072	1	2.866.041.333	1	2.897.042.442	1	2.930.977.820		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1.336.561.700		1.341.515.935		1.367.478.694		1.382.270.300		1.398.461.940		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	2	1.336.561.700	2	1.341.515.935	2	1.367.478.694	2	1.382.270.300	2	1.398.461.940		
1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.464.682.000		1.470.111.137		1.498.562.639		1.514.772.142		1.532.515.880		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	1.464.682.000	1	1.470.111.137	1	1.498.562.639	1	1.514.772.142	1	1.532.515.880		
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan di Puskesmas melalui transformasi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan siklus hidup (kluster)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	926.532	926.532	371.706.850	926.532	373.084.656	926.532	380.305.075	926.532	384.418.721	926.532	388.921.725		
1.02.02.1.02.0030 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				371.706.850		373.084.656		380.305.075		384.418.721		388.921.725		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	926.532	926.532	371.706.850	926.532	373.084.656	926.532	380.305.075	926.532	384.418.721	926.532	388.921.725		
Meningkatnya Layanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	318.453.600	1	319.634.012	1	325.819.985	1	329.344.280	1	333.202.155		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				318.453.600		319.634.012		325.819.985		329.344.280		333.202.155		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	318.453.600	1	319.634.012	1	325.819.985	1	329.344.280	1	333.202.155		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	2.955.945.400	1	2.966.902.202	1	3.024.321.551	1	3.057.034.732	1	3.092.844.223		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	2.744	2.744		2.744		2.744		2.744		2.744			
1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				573.893.300		576.020.550		587.168.449		593.519.675		600.472.045		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1	573.893.300	1	576.020.550	1	587.168.449	1	593.519.675	1	600.472.045		
1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				122.595.500		123.049.925		125.431.347		126.788.100		128.273.270		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1	122.595.500	1	123.049.925	1	125.431.347	1	126.788.100	1	128.273.270		
1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				825.192.000		828.250.739		844.280.124		853.412.450		863.409.152		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	825.192.000	1	828.250.739	1	844.280.124	1	853.412.450	1	863.409.152		
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.216.459.500		1.220.968.550		1.244.598.321		1.258.060.767		1.272.797.440		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.216.459.500	1	1.220.968.550	1	1.244.598.321	1	1.258.060.767	1	1.272.797.440		
1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				122.752.800		123.207.808		125.592.285		126.950.780		128.437.856		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1	122.752.800	1	123.207.808	1	125.592.285	1	126.950.780	1	128.437.856		
1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				95.052.300		95.404.630		97.251.025		98.302.960		99.454.460		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	2.744	2.744	95.052.300	2.744	95.404.630	2.744	97.251.025	2.744	98.302.960	2.744	99.454.460		
Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional (%)	40	43	19.853.131.665	46	19.926.721.268	49	20.312.369.082	52	20.532.081.885	55	20.772.590.585		
	Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standart; (%)	70,29	75		79		83		87		90			
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				63.507.544.027		63.742.947.441		64.976.583.825		65.679.416.039		66.448.771.584		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Sediaan Farmasi di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	3	19.853.131.665	3	19.926.721.268	3	20.312.369.082	3	20.532.081.885	3	20.772.590.585		
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				834.819.300		837.913.725		854.130.120		863.368.990		873.482.320		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	12	12	834.819.300	12	837.913.725	12	854.130.120	12	863.368.990	12	873.482.320		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				19.018.312.365		19.088.807.543		19.458.238.962		19.668.712.895		19.899.108.265		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	3	19.018.312.365	3	19.088.807.543	3	19.458.238.962	3	19.668.712.895	3	19.899.108.265		
Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi; (%)	96	96	113.515.652.137	100	113.936.420.605	100	116.141.466.335	100	117.397.733.732	100	118.772.907.309		
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan (Per 1000 Penduduk)	1,49	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	41,3	90		92		94		95		96,5			
	Persentase FKTP terakreditasi Paripurna (%)	44	46		47		48		49		50			
	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pasien keluar sembuh/mandiri (%)	95	95		95		95		95		95			
	Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (%)	60	70		75		80		90		100			
	Nilai akreditasi Rumah Sakit (Angka)	89	90		90		90		90		90			
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				63.507.544.027		63.742.947.441		64.976.583.825		65.679.416.039		66.448.771.584		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	49	1.458	43.374.236.130	1.442	43.535.011.412	1.412	44.377.557.548	1.409	44.857.576.274	1.409	45.383.028.954		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	16		23		23		27		35			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	2	6		8		10		12		14			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	250	1.740		1.740		1.740		1.740		1.740			
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				166.102.200		166.717.891		169.944.432		171.782.670		173.794.900		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	166.102.200	1	166.717.891	1	169.944.432	1	171.782.670	1	173.794.900		
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				10.061.026.000		10.098.319.205		10.293.755.006		10.405.099.465		10.526.982.720		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	16	10.061.026.000	23	10.098.319.205	23	10.293.755.006	27	10.405.099.465	35	10.526.982.720		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				16.652.179.288		16.713.903.922		17.037.373.118		17.221.661.272		17.423.392.367		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	49	1.458	16.652.179.288	1.442	16.713.903.922	1.412	17.037.373.118	1.409	17.221.661.272	1.409	17.423.392.367		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				912.151.300		915.532.371		933.250.944		943.345.640		954.395.800		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1	912.151.300	1	915.532.371	1	933.250.944	1	943.345.640	1	954.395.800		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.571.417.662		4.588.362.536		4.677.162.493		4.727.753.956		4.783.133.920		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	250	1.740	4.571.417.662	1.740	4.588.362.536	1.740	4.677.162.493	1.740	4.727.753.956	1.740	4.783.133.920		
1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				258.969.750		259.929.673		264.960.170		267.826.165		270.963.430		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	2	6	258.969.750	8	259.929.673	10	264.960.170	12	267.826.165	14	270.963.430		
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				10.752.389.930		10.792.245.814		11.001.111.385		11.120.107.106		11.250.365.817		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	3	10.752.389.930	3	10.792.245.814	3	11.001.111.385	3	11.120.107.106	3	11.250.365.817		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				78.646.795.007		78.938.315.081		80.466.031.975		81.336.408.904		82.289.167.330		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi dan standar pelayanan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	64.098.588.757	1	64.336.182.995	1	65.581.300.447	1	66.290.673.699	1	67.067.189.393		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				61.745.867.532		61.974.740.939		63.174.156.693		63.857.492.595		64.605.506.490		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	12	61.745.867.532	12	61.974.740.939	12	63.174.156.693	12	63.857.492.595	12	64.605.506.490		
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1.781.325.500		1.787.928.339		1.822.530.653		1.842.244.420		1.863.824.104		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.781.325.500	1	1.787.928.339	1	1.822.530.653	1	1.842.244.420	1	1.863.824.104		
1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				63.686.625		63.922.692		65.159.807		65.864.621		66.636.146		
Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	63.686.625	1	63.922.692	1	65.159.807	1	65.864.621	1	66.636.146		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				343.000.000		344.271.398		350.934.186		354.730.135		358.885.373		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	1	343.000.000	1	344.271.398	1	350.934.186	1	354.730.135	1	358.885.373		
1.02.02.1.02.0024 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik				164.709.100		165.319.627		168.519.108		170.341.928		172.337.280		
Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1	164.709.100	1	165.319.627	1	168.519.108	1	170.341.928	1	172.337.280		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.420.921.475		1.426.188.405		1.453.789.857		1.469.515.065		1.486.728.671		
Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.420.921.475	1	1.426.188.405	1	1.453.789.857	1	1.469.515.065	1	1.486.728.671		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.420.921.475		1.426.188.405		1.453.789.857		1.469.515.065		1.486.728.671		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.420.921.475	1	1.426.188.405	1	1.453.789.857	1	1.469.515.065	1	1.486.728.671		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				4.621.905.775		4.639.037.793		4.728.818.483		4.779.968.694		4.835.960.291		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Penguatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	6	6	4.621.905.775	6	4.639.037.793	6	4.728.818.483	6	4.779.968.694	6	4.835.960.291		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	45	564		578		597		613		630			
	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	48	23		26		29		32		40			
1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				201.552.600		202.299.695		206.214.862		208.445.426		210.887.114		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	6	6	201.552.600	6	202.299.695	6	206.214.862	6	208.445.426	6	210.887.114		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				944.112.300		947.611.841		965.951.257		976.399.662		987.837.012		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	48	23	944.112.300	26	947.611.841	29	965.951.257	32	976.399.662	40	987.837.012		
1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				3.476.240.875		3.489.126.257		3.556.652.364		3.595.123.606		3.637.236.165		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	45	564	3.476.240.875	578	3.489.126.257	597	3.556.652.364	613	3.595.123.606	630	3.637.236.165		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				31.556.763.500		31.673.734.955		32.286.726.250		32.635.962.082		33.018.253.214		
Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	-	100	31.556.763.500	100	31.673.734.955	100	32.286.726.250	100	32.635.962.082	100	33.018.253.214	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase Fasyankes dengan SDMK sesuai Standart (%)	85	86,5		87,5		88,5		89,5		90,5			
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				24.237.444.200		24.327.285.134		24.798.098.382		25.066.331.973		25.359.953.972		
Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis sesuai Standar Kompetensi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	391	391	24.237.444.200	391	24.327.285.134	391	24.798.098.382	391	25.066.331.973	391	25.359.953.972		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	219	404		545		545		545		545			
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				8.172.860.000		8.203.154.340		8.361.912.447		8.452.360.745		8.551.370.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	219	404	8.172.860.000	545	8.203.154.340	545	8.361.912.447	545	8.452.360.745	545	8.551.370.000		
1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				16.064.584.200		16.124.130.794		16.436.185.935		16.613.971.228		16.808.583.972		
Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	391	391	16.064.584.200	391	16.124.130.794	391	16.436.185.935	391	16.613.971.228	391	16.808.583.972		
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				7.319.319.300		7.346.449.821		7.488.627.868		7.569.630.109		7.658.299.242		
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	2.989	5.231	7.319.319.300	5.273	7.346.449.821	5.232	7.488.627.868	5.388	7.569.630.109	5.438	7.658.299.242		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.830.496.100		5.852.108.000		5.965.365.602		6.029.891.172		6.100.524.110		
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	2.989	5.231	5.830.496.100	5.273	5.852.108.000	5.232	5.965.365.602	5.388	6.029.891.172	5.438	6.100.524.110		
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.488.823.200		1.494.341.821		1.523.262.266		1.539.738.937		1.557.775.132		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.488.823.200	1	1.494.341.821	1	1.523.262.266	1	1.539.738.937	1	1.557.775.132		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				377.315.400		378.713.995		386.043.361		390.219.075		394.790.024		
Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar (%)	75	78	377.315.400	81	378.713.995	84	386.043.361	87	390.219.075	90	394.790.024	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				320.017.400		321.203.608		327.419.959		330.961.561		334.838.379		
Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	39	50	320.017.400	51	321.203.608	52	327.419.959	53	330.961.561	54	334.838.379		
1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				320.017.400		321.203.608		327.419.959		330.961.561		334.838.379		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	39	50	320.017.400	51	321.203.608	52	327.419.959	53	330.961.561	54	334.838.379		
1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				57.298.000		57.510.387		58.623.402		59.257.514		59.951.645		
Meningkatnya Kualitas Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	5	5	57.298.000	5	57.510.387	5	58.623.402	5	59.257.514	5	59.951.645		
1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				57.298.000		57.510.387		58.623.402		59.257.514		59.951.645		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	5	5	57.298.000	5	57.510.387	5	58.623.402	5	59.257.514	5	59.951.645		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.914.125.100		1.921.220.188		1.958.402.138		1.979.585.587		2.002.774.056		
Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) (%)	20	40	1.914.125.100	50	1.921.220.188	60	1.958.402.138	70	1.979.585.587	80	2.002.774.056	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1.065.113.300		1.069.061.355		1.089.751.220		1.101.538.733		1.114.441.937		
Meningkatnya Efektivitas Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemitraan Lintas Sektor dalam Program Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan.	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	1.065.113.300	1	1.069.061.355	1	1.089.751.220	1	1.101.538.733	1	1.114.441.937		
1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1.065.113.300		1.069.061.355		1.089.751.220		1.101.538.733		1.114.441.937		
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	1.065.113.300	1	1.069.061.355	1	1.089.751.220	1	1.101.538.733	1	1.114.441.937		
1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				688.726.100		691.279.002		704.657.531		712.279.600		720.623.101		
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Upaya Promotif dan Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	688.726.100	1	691.279.002	1	704.657.531	1	712.279.600	1	720.623.101		
	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				316.718.900		317.892.882		324.045.158		327.550.258		331.387.116		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	316.718.900	1	317.892.882	1	324.045.158	1	327.550.258	1	331.387.116		
1.02.05.1.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				372.007.200		373.386.120		380.612.373		384.729.342		389.235.985		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	372.007.200	1	373.386.120	1	380.612.373	1	384.729.342	1	389.235.985		
1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				160.285.700		160.879.831		163.993.387		165.767.254		167.709.018		
Meningkatnya Kapasitas, Keterjangkauan, dan Keberlangsungan Layanan UKBM dalam Mendukung Pelayanan Promotif dan Preventif di Tingkat Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1	1	160.285.700	1	160.879.831	1	163.993.387	1	165.767.254	1	167.709.018		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.05.1.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				160.285.700		160.879.831		163.993.387		165.767.254		167.709.018		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1	1	160.285.700	1	160.879.831	1	163.993.387	1	165.767.254	1	167.709.018		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
		Meningkatnya Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
			1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
			1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.02.0024 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	
		Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah dalam Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
			1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif dan Lansia serta Gizi Masyarakat dengan Penguatan Layanan Kesehatan Dasar	1.02.02.1.02.0030 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
			1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
			1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
			1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
			1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
			1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.1.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.05.1.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,05	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25	90,3	
3.	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	%	12	11,2	10,5	9,8	9,2	8,6	8,02	
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	89,3	89,3	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
5.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	146	189	172	154	137	119	102	
6.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Angka	0	2	2	2	2	2	2	
7.	Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	Angka	11,6	11,3	11,2	10,8	10,5	10,3	10	
8.	Angka Kesakitan	Angka	5,405	5,4	5,3	5	4,95	4,9	4,8	
9.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6	
10.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	positif	Per 1000 Penduduk	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
3.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terkareditasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	